

E-GOVERNMENT* PADA PENERAPAN *SMS GATEWAY

DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RISMAN

Nomor Stambuk : 10564 02172 15



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

E-GOVERNMENT PADA PENERAPAN SMS GATEWAY

DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Skripsi

Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RISMAN

Nomor Stambuk : 10564 02172 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *E-Government* pada Penerapan *SMS Gateway* di
Kabupaten Manggarai Barat

Nama Mahasiswa : Risman

Nomor Stambuk : 10564 02172 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Pembimbing I

Pembimbing II


Abdul Kadir Adys, SH, MM


Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0049/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019.



Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hj. Ilyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Abd Kadir Adys, SH., MM (Ketua)
2. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
3. Rudi Hardi, S. Sos., M.Si
4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Risman

Nomor Stambuk : 10564 02172 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 01 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



RISMAN

ABSTRAK

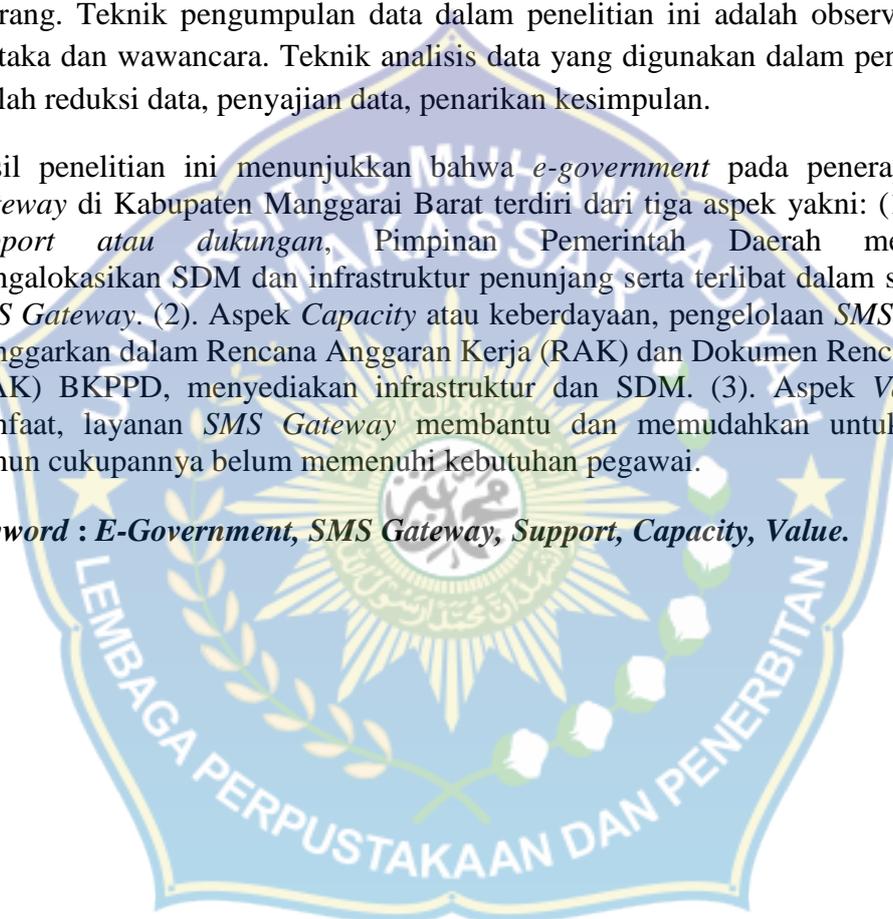
RISMAN, 2019. *E-Government pada Penerapan SMS Gateway di Kabupaten Manggarai Barat* (Dibimbing oleh Kadir Adys dan Rudi Hardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *e-government* pada penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat.

Jenis dan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-government* pada penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari tiga aspek yakni: (1). Aspek *Support* atau *dukungan*, Pimpinan Pemerintah Daerah menyetujui, mengalokasikan SDM dan infrastruktur penunjang serta terlibat dalam sosialisasi *SMS Gateway*. (2). Aspek *Capacity* atau *keberdayaan*, pengelolaan *SMS Gateway* dianggarkan dalam Rencana Anggaran Kerja (RAK) dan Dokumen Rencana Kerja (RAK) BKPPD, menyediakan infrastruktur dan SDM. (3). Aspek *Value* atau *manfaat*, layanan *SMS Gateway* membantu dan memudahkan untuk diakses namun cukupannya belum memenuhi kebutuhan pegawai.

Keyword : *E-Government, SMS Gateway, Support, Capacity, Value.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***E-GOVERNMENT PADA PENERAPAN SMS GATEWAY DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT***”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

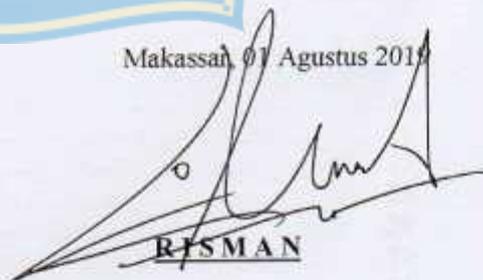
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Abdul Kadir Adyas, SH, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II. Yang ditengah kesibukannya selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, juga sebagai motivator yang tiada hentinya memberi semangat kepada penulis untuk tetap optimis dalam mengejar cita-cita. Juga terimakasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Sakila dan Ibu Rosita) dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu dan arahnya untuk senantiasa menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudariku IMMawan dan IMMawati di lembaga kemahasiswaan PIKOM IMM FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, yang selalu serta mengingatkan penulis agar senantiasa semangat dan fokus untuk mencapai gelar sarjana.
6. Bapak Kepala Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya yang tiada henti mendampingi dan membantu memperoleh data penelitian ini.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 01 Agustus 2019



RISMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep, Definisi dan Teori.....	7
1. <i>E-Government</i>	7
2. Jenis-jenis Pelayanan pada <i>E-Government</i>	8
3. Tipe Relasi <i>E-Government</i>	10
4. Elemen Sukses Penerapan <i>E-Governmen</i>	11
5. <i>Short Message Servive (SMS)</i>	13
6. <i>SMS Gateway</i>	15
7. Program <i>SMS Gateway</i>	15
B. Penelitian Terdahulu.....	16
C. Kerangka Pikir.....	21
D. Fokus Penelitian.....	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Profil Kabupaten Manggarai Barat.....	33
1. Sejarah.....	33

2. Visi dan Misi.....	35
3. Letak dan Luas	36
4. Demografi	36
5. Topografi Jenis Tanah dan Iklim.....	37
6. Potensi Sumber Daya Alam.....	38
B. Profil Badan Kepegawaian, Pendidika dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggara Barat.....	41
1. Visi dan Misi.....	41
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	42
3. Program Kerja.....	43
4. Struktur Organisasi.....	43
C. Program <i>SMS Gateway</i> di Kabupaten Manggarai Barat.....	44
1. Profil <i>SMS Gateway</i>	44
2. Cakupan layanan <i>SMS Gateway</i>	45
3. Produk <i>SMS Gateway</i>	46
4. Dasar Hukum <i>SMS Gateway</i>	46
5. Infrastruktur <i>SMS Gateway</i>	47
D. <i>E-Government</i> pada Penerapan <i>SMS Gateway</i> di Kabupaten Manggarai Barat.....	47
1. <i>Support</i>	48
2. <i>Capacity</i>	60
3. <i>Value</i>	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80
RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel iii.1 Informan.....	29
Tabel IV.1 Produk <i>SMS Gateway</i>	46
Tabel IV.2 Infrastruktur <i>SMS Gateway</i>	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan tersebar diseluruh penjuru Nusantara. Besarnya jumlah penduduk dan penyebaran penduduk ini menuntut pelayanan publik yang memenuhi keperluan semua masyarakat di seluruh wilayah Negara. Dapat diandalkan dan terpercaya serta lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun secara interaktif.

Masyarakat juga mengharapkan agar aspirasi-aspirasi mereka didengar, oleh karena itu pemerintah harus melibatkan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan mengadakan dialog publik di dalam perumusan kebijakan Negara. Tuntutan masyarakat akan hal-hal tersebut menuntut pemerintah melakukan proses transformasi dari sistem dan proses kerja yang berdasarkan pada tatanan birokrasi pemerintah yang kaku dan mustahil menjawab perubahan-perubahan yang kompleks dan dinamis menjadi sistem dan proses kerja yang mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna membentuk jaringan sistem manajemen kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintahan bekerja secara terpadu untuk memudahkan akses ke semua layanan public dan mendapatkan informasi. Hasil dari perubahan inilah yang biasa kita dengar sebagai *e-government*.

Electronic Government atau yang sering kita sebut sebagai *e-government* merupakan suatu inovasi pelayanan public dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika, yang hadir pada tahun 2003 di Indonesia. Konsep tentang penggunaan teknologi komunikasi dan informatik dibidang pemerintahan ini sendiri sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2000, ditandai dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang memiliki tugas pokok dan fungsi dijabarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penggunaan Telematika di Indonesia, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan munculnya konsep *e-government* pada tahun 2003. Sejalan dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 3, Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Sejak saat itulah pemerintah Indonesia mengencarkan pemanfaatan terhadap teknologi komunikasi dan informatika sebagai salah satu sarana dalam proses pemerintahan supaya menunjang kualitas pelayanan publik.

Adanya masalah-masalah yang muncul, mulai dari sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi terkait pemerintah dan sulitnya masyarakat menyampaikan aspirasi-aspirasinya secara langsung kepada pihak pemerintah, menjadi latar belakang yang sangat kuat untuk menerapkan konsep *e-government* dalam sitem pelayanan publik. Penerapan konsep *e-government* ini akan memudahkan masyarakat memperoleh Informasi dan menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Bagi pemerintah tentunya *e-governtment* dijadikan alat untuk mencapai efektifitas serta efisiensi sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sendiri, *e-government* sudah mulai diterapkan. Beberapa bukti dari penerapan *e-government* ini adalah dengan adanya *website* atau halaman web yang dimiliki oleh pemerintahan tersebut yang memuat profil dan berbagai informasi terkait informasi pemerintahan dan tentunya dapat kita akses melalui jaringan internet atau perangkat yang mendukung, serta peluncuran aplikasi-aplikasi dalam pelayanan publik. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menginstruksikan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung RI serta Gubernur serta Bupati/Walikota. Untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing agar terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*.

Merumuskan rencana tindak lanjut di lingkungan masing-masing instansi dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta melaksanakan rencana tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Pemerintahan Kabupaten Manggarai

Barat juga sudah menerapkan *e-government*. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan *website* resmi Kabupaten Manggarai Barat.

Namaun tidak cukup dengan kepemilikan *website*, mengingat Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai, berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2003 dan masih terbilang kabupaten yang berumur 15 tahun semenjak ditetapkannya sebagai kabupaten otonom dengan 10 kecamatan, diantaranya; Kecamatan Kuwus, Kecamatan Lembor, Kecamatan Sano Ngoang, Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Welak, Kecamatan Ndosos, kecamatan Welak, kecamatan Lembor selatan, dan Kecamatan Mbeliling. Dibawah kepemimpinan Bupati Drs. Agustinus Ch Dula dan Wakil Bupati drh. Maria Geong, Ph.D, Kabupaten Manggarai Barat berkembang pesat. Bahkan menjadi *TOP FOUR* destinasi (*AM IMF-WB 2018*) serta banyak mendapatkan prestasi dan salah satunya adalah dalam bidang pemerintahan yang mendapatkan sertifikat adipura serta laporan kinerja pemerintahan (LAKIP) bernilai baik. Oleh karna itu Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan berbagai manuver dalam usaha pengembangan *e-government*, seperti penandatanganan MoU kerja sama pengembangan *e-government* oleh Bupati Manggarai Barat dengan Bupati Kabupaten Batam, serta peluncuran beberapa aplikasi pelayan publik.

Salah satunya adalah peluncuran aplikasi *SMS Gateway* melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat. *SMS Gateway* adalah suatu platform yang menyediakan

mekanisme untuk menghantar dan menerima *SMS* dari peralatan *mobile* (HP, Smartphone, dan sebagainya) yang menggunakan *keyword* tertentu. Secara umum *SMS Gateway* ini adalah sebuah sistem yang dipergunakan untuk mempermudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat untuk memperoleh informasi tentang kepegawaian terkait dengan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan dengan hanya menggunakan sebuah peralatan *mobile* (HP, *Smartphone*, dan sebagainya) yang mempunyai fitur *SMS*.

Aplikasi *SMS Gateway* ini merupakan aplikasi untuk memudahkan pegawai dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan para pegawai atau karyawan pemerintah yang bekerja di institusi sebagai pelayan masyarakat, serta salah satu bentuk dari relasi *e-government* yaitu *Government to Employoyes* (G-to-E). Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat dalam hal penerapan *e-government* dan terkhusus penerapan *SMS Gateway* masih terbilang baru.

Baru akhir tahun 2018 tepatnya tanggal 05 Oktober 2018. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Manggarai Barat mengadakan rapat pemaparan laporan akhir dan louncing aplikasi sebagai hasil akhir dari kegiatan penyusunan *Grand Desing E-Government (E-Gov)* Kabupaten Manggarai Barat yang meliputi Rencana Induk Pengembangan *E-Gov*, Rencana Induk *Smart City*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“E-Government pada Penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana *e-government* pada penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *e-government* pada penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis, adalah untuk memperkaya pengetahuan penulis dan pembaca tentang bagaimana *e-government* pada penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat. Serta menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara Praktis, adalah hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sumber informasi dan memberikan masukan bagi pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat mengenai *e-government*, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan pembeajaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun swasta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep, Definisi dan Teori

1. *E-Government*

Menurut Indriajit (2007:5), kata “*e-government*” dapat diartikan secara beragam karena *e-government* dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Karna itu merupakan keharusan untuk mendefinisikan secara jelas visi dari pengembangan *e-government* tersebut.

Jiwa *e-government* sebenarnya adalah usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan objekti bersama dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. *E-Government* adalah pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan khususnya internet sebagai salah satu alat pemerintahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga negara, lembaga swasta dan lembaga-lembaga pemerintah yang saling berinteraksi (Hayati dan Purnomo,2018:1).

Menurut Indrajit (2006:8) *E-Government* adalah mekanisme interaksi baru antar pemerintah dengan pihak masyarakat serta kalangan lain yang berkepentingan (*Stakeholder*), yang melibatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Atau dengan kata lain, *E-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan dari kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Pada intinya *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan hubungan pemerintah dengan

pihak-pihak lain. *E-Government* membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempercepat pekerjaan yang manual dengan bantuan teknologi informasi (Yusuf dan Jumhur,2018:2). Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-government*, bahwa pengembangan *e-government* merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan publik secara eektif dan efisien.

Melalui pengembangan *e-government* dilakukanlah penataan sistem manajemen serta proses kerja dilingkup pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup; pengelolaan data, pengelolaan informasi dan sistem manajemen serta proses kerja secara elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi agar pelayanan publik dapat kemudian diakses secara mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara.

2. Jenis-Jenis Pelayanan Pada *E-Government*

Menurut Indriajit (2006:21) *e-government* dalam implementasinya dapat dilihat banyak tipe-tipe pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan *e-government*. Jenis-jenis pelayanan publik dapat dikategorisasikan dengan melihat dua aspek utama, yaitu; aspek kompleksitas, yaitu terkait seberapa rumit anatomi dari aplikasi *e-government* yang akan dibangun dan diterapkan. Dan aspek manfaat ialah terkait hal-hal yang

berkaitan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna.

Berdasarkan dua aspek inilah *e-government* dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu:

- a. *Publish*, adalah jenis pelayanan satu arah. Pemerintah mempublikasikan bermacam data-data dan informasi untuk secara langsung dan bebas diakses masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan. Seperti website yang menyediakan berbagai informasi dan data.
- b. *Interack*, adalah jenis pelayanan yang sifatnya pasif, dimana terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat atau mereka yang berkepentingan. Ada dua bentuk aplikasi yang biasa digunakan, pertama berbentuk portal yang menyediakan fasilitas pencarian bagi masyarakat yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Kedua pemerintah menyediakan kanal, dimana masyarakat dapat melakukan dialog dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
- c. *Transack*, adalah jenis pelayanan komunikasi dua arah dan terjadi sebuah transaksi atau pertukaran uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Atau dengan kata lain masyarakat atau pengguna jasa layanan harus membayar jasa pelayanan.

3. Tipe Relasi *E-Government*

Menurut Indriajit (2006:27) bahwa dalam konsep *e-government* dikenal jenis klasifikasi, yaitu: G-to-C, G-toB, G-to-G, dan G-to-E.

- a. *Government to Citizens* (G-to-C), ialah aplikasi *e-government* yang sangat umum, dimana pemerintah membangun dan menetapkan bermacam portofolio teknologi informasi dengan maksud untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat atau rakyat. Contoh aplikasi seperti: layanan perpanjangan SIM dan STNK melalui internet oleh Kepolisian, pendaftaran ibadah haji oleh Kementerian Agama, dln.
- b. *Government to Business* (G-to-B), merupakan aplikasi *e-government* yang bertujuan membangun relasi yang baik antar pemerintah dengan kalangan bisnis. Dengan contoh aplikasi seperti: perusahaan wajib pajak dengan mudah menggunakan aplikasi berbasis *web* guna menghitung besar pajak yang harus dibayarkan ke pemerintahan dan membayarkan melalui internet atau proses tender proyek-proyek pemerintah yang melibatkan beberapa pihak swasta dapat dilakukan melalui *website*.
- c. *Government to Government* (G-to G), merupakan aplikasi untuk kebutuhan berinteraksi antar pemerintah dengan pemerintah setiap harinya, seperti urusan diplomasi serta urusan kerjasama antar elit-elit negara.

d. *Government to Employees (G-to-E)*, merupakan aplikasi digunakan untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja di institusi sebagai pelayan masyarakat. Dengan contoh aplikasi seperti sistem pengembangan karir dari pegawai pemerintah yang bertujuan untuk meyakinkan adanya sebuah perbaikan dari kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang dari proses mutasi, rotasi, demosi dan promosi karyawan pemerintah,. aplikasi terpadu yang digunakan mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai, sistem asuransi pendidikan dan kesehatan bagi pegawai pemerintahan.

Menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi e-government tersebut, maka terlihat jelas fungsi-fungsi strategis dari aplikasi *e-government* yang dikembangkan oleh sebuah negara yang keberadaannya tidak hanya meningkatkan kinerja pegawai pemerintah kepada masyarakat, namun lebih jauh guna meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara yang pada akhirnya akan bermuara pada kemajuan Negara.

4. Elemen Sukses Penerapan *E-Government*

Menurut Indriajit (2006:13) untuk menerapkan *e-government* pada sektor publik, ada tiga elemen yang harus dimiliki dan diperhatikan, elemen tersebut ialah:

a. *Support*, merupakan hal pertama dan yang paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah ialah keinginan yang kuat dari berbagai kalangan pejabat-pejabat publik dan pejabat-pejabat politik untuk

benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan sekedar mengikuti trend atau menentang inisiatif berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-government*. Tanpa adanya unsur keinginan politik atau *political will* ini, mustahil berbagai inovasi pengembangan dan pembangunan *e-government* dapat berjalan dengan lancar. *Support* atau dukungan ini arus berangkat dari atas, dimualai dari para pemimpin pemerintah yang berada pada level tertinggi (Presiden dan Menteri) sebelum merambat pada level-level dibawahnya. Dukungan berupa :

- 1) Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai suatu kunci kesuksesan negara dalam mengapai visi dan misinya.
- 2) Dialokasikannya sejumlah sumberdaya (manusia, waktu, informasi, dan lain-lain) disetiap level pemerintahan untuk membangun dengan semangat lintas sektoral.
- 3) Dibangunnya infastruktur dan suprastruktur pendukung.
- 4) Disosialisasikannya konsep *e-government* dengan merata, berlanjut, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrasi atau pegawai dan masyarakat secara umum.

b. *Capacity*, merupakan unsur keberdayaan dari pemerintah dalam mewujudkan impian *e-government* yang terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal yang minimum dimiliki oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu :

- 1) Ketersediaan sumber daya memadai untuk melaksanakan bermacam inisiatif *e-government*, terutama dalam hal sumber daya finansial.
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi yang memadai dikarenakan fasilitas ini merupakan 50% keberhasilan penerapan konsep *e-government*.
- 3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkopetensi serta keahlian yang dibutuhkan dalam rangka penerapan *e-government* yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan darinya.

c. *Value*, merupakan hal yang dilihat dari pihak yang diuntungkan dengan adanya penerapan *e-government* tersebut. Ada tiga hal yang harus dirasakan oleh pihak diuntungkan, yaitu :

- 1) Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan.
- 2) Bagaimana layanan tersebut bisa diakses.
- 3) Kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut.

Maksimalisasi ketiga elemen di atas akan membentuk pusat saraf jaringan *e-government* yang menjadi kunci keberhasilan penerapan *e-government*.

5. Short Message Servive (SMS)

Short Message Servive atau SMS merupakan teknologi yang memungkinkan untuk menerima atau mengirim pesan antara telepon atau ponsel. Teknologi ini pertama diperkenalkan oleh *European*

Telecommunications Standart Institute (ETSI) pada tahun 1992 di Eropa. Awalnya menjadi suatu standar untuk telepon *wireless* yang berbasis *GSM* (*Global System for Mobile Communications*). Namun, teknologi yang lain seperti CDMA dan TDMA juga memasukkan *SMS* sebagai fitur standar. Sebagaimana namanya, *SMS* yang berarti layanan pendek, maka besar data yang dimuat oleh *SMS* sangat terbatas.

Untuk satu *SMS* yang dikirimkan, hanya mampu menampung paling banyak 140 byte atau sekitar 1120 bites saja. Bila diubah dalam bentuk karakter, maka untuk satu *SMS* hanya mampu berisi 160 karakter untuk karakter latin, 70 untuk karakter non-latin seperti Cina ataupun Jepang (Asep,2010:4).

Menurut Ari (2017;10) mengatakan bahwa *SMS* (*Short Message Service*) merupakan satu mode komunikasi yang handal saat ini, *SMS* merupakan layanan yang disediakan oleh operator ponsel guna mengirim dan menerima pesan. *SMS* ini dinilai sangat praktis dan murah serta efisien. Menurut perilaku pengguna ponsel, sampai sekarang dapat dikatakan bahwa semua *SMS* yang masuk berkemungkinan besar atau bahkan pasti akan dibaca karena sifat dari ponsel yang personal. Selain untuk mengirim pesan antar pengguna ponsel, *SMS* juga dapat juga diterapkan dan berinteraksi dengan sistem informasi yang berbasis komputer.

6. *SMS Gateway*

Menurut Asep (2010:4) Istilah *gateway*, jika dilihat pada kamus bahasa Inggris-Indonesia diartikan sebagai sebuah pintu gerbang. Namun dalam dunia komputer, *gateway* berarti jembatan penghubung antara satu sistem dengan sistem yang lainnya, sehingga terjadi suatu pertukaran data antara sistem tersebut. Dengan demikian, *SMS gateway* dapat diartikan sebagai sebuah penghubung lintas data *SMS*, baik yang dikirim maupun yang diterima.

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, baik dari sisi *hardware* maupun sisi *software* serta perkembangan teknologi komunikasi, *SMS gateway* tidak lagi kemudian dimaksudkan sebagai ilustrasi diatas. Sedangkan masyarakat lebih menagartikan *SMS gateway* sebagai jembatan komunikasi yang dapat menyambungkan antar ponsel dengan komputer yang menjadikan aktifitas *SMS* lebih mudah serta menyenangkan. Pengertian *SMS gateway* kemudian lebih mengarah kepada sebuah program yang mengkomunikasikan antara sistem operasi komputer dengan ponsel yang terpasang guna mengirim atau menerima *SMS*.

7. *Program SMS Gateway*

Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) meluncurkan aplikasi *SMS Gateway* yang terintegritas dengan Badan Kepegawaian Negara. *SMS Gateway* ialah suatu *platform* yang meyediakan mekanisme untuk menghantar dan menerina *SMS* dari alat-alat *mobile* (Hp, *Smartphone*, dan

sebagainya) dan menggunakan *keyword* tersendiri. *SMS Gateway* merupakan aplikasi yang termasuk dalam relasi *government to employees* (G to E) dalam konsep *e-government*. *SMS Gateway* merupakan bagian dari perkembangan fungsi dari *SMS*.

Secara umum *SMS Gateway* ini adalah sebuah sistem yang dipergunakan untuk mempermudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat untuk memperoleh informasi tentang kepegawaian guna meningkatkan kinerja serta kesejahteraan dari para pegawai negeri yang bekerja di institusi sebagai pelayan masyarakat dengan hanya menggunakan sebuah telepon yang mempunyai fitur *SMS* (bkppdmabar, 2 Januari 2019).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reyhan Maulidian Salahuddin dengan Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H, M.H pada tahun 2018, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, dengan judul “Penerapan *E-Government* dalam Membangun *Smart City* pada Kota Bandung Tahun 2018”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* secara kuantitas artikel hasil penelitian dengan tema *e-government* Indonesia dalam kurung waktu 5 tahun terakhir masih sangat kurang. Jumlah ini diyakini berdampak pada kurangnya kontribusi lembaga penelitian dalam

memberikan data dan informasi terkait formulasi pengembangan *e-government* di Indonesia. Ini juga diyakini menjadi salah satu faktor inkonsistensi pengembangan *e-government* ditandai dengan peringkat Indonesia pada penilaian *Government PBB* yang menurun (Firdaus,2017:8).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angriani pada tahun 2015, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul penelitian “Penerapan *E-Government* di Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Kabupaten Palalawan Riau)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Kabupaten Palalawan Riau masih perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan yang dilakukan PEGI masih belum ditindak lanjuti. Untuk menerapkan *e-government* yang sejalan dengan petunjuk yang dikeluarkan pemerinth pusat. Kabupaten Palalawan sudah mengembangkan rencana strategis teknologi dan informasi. Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kesiapan sumbe rdaya manusiapun akan membantu kesuksesan pada penerapan *e-government* (Angriani,2015:11).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sonny pada tahun 2013, mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako, dengan judul penelitian “Analisis Penerapan *E-Government*

pada pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, dan belum seluruhnya dijalankan pada seluruh SKPD, dari 45 SKPD yang ada baru 19 yang dapat melaksanakan *e-government* (Sony,2013:8).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Mansyur pada tahun 2017, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar. Dengan judul penelitian “Penelitian *E-Government* di Indonesia: Studi Literasi Sistematis dari Perspektif dan Dimensi Pernerangan *E-Government* di Indonesia (PeGI)”.

Hasil penelitian menunjukkan secara kuantitas artikel hasil penelitian dengan tema *e-government* Indonesia dalam kurung waktu 5 tahun terakhir masih sangat kurang. Jumlah ini diyakini berdampak pada kurangnya kontribusi lembaga penelitian dalam memberikan data dan informasi terkait formulasi pengembangan *e-government* di Indonesia. Ini juga diyakini menjadi salah satu faktor inkonsistensi pengembangan *e-government* ditandai dengan peringkat Indonesia pada penilaian *Government PBB* yang menurun (Firdaus,2017:8).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Eko Priyo Purnomo pada tahun 2018, Mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan judul penelitian “Implementasi *E-Governmet* pada Pemerintahan Daerah Kabupaten bantul Yogyakarta”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau pengimplementasian *e-government* di Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik, yaitu telah menaati peraturan yang diinstruksikan dari pemerintah pusat untuk memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi kedalam proses tatakelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Dalam penerapannya Kabupaten Bantul telah mencapai nilai baik disetiap indikator yang menjadi dasar penilaian terhadap rencana, proses, jalan dan hasil yang telah dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu *efektifitas, efisien, transparansi* dan *akuntabilitas* (Hayati dan Purnomo,2018:19).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Suhartono pada tahun 2017, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Madiun. Dengan judul penelitian “Pemanfaatan Teknologi *SMS Gateway* pada Implementasi Pemodelan Pelayanan Nasabah”. Penelitian ini menggunakan metode *System development Life Cycle* (SDLC).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sistem ini sangat membantu kinerja dari koperasi yang menyatakan lebih efisien dalam menggunakan sistem ini dikarenakan proses pengiriman pesan *SMS* kepada nasabah tidak perlu dijalankan oleh setiap staf AO atau mengunjungi secara langsung, namun cukup dengan mengirimkan pesan

pengingat asuran dan jatuh tempo ansuran serta peringkatan denda pembayaran kerana keterlambatan (Suhartono,2017:18).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fujiana Diapoldo Silalahi dan Iwan Koerniawan pada tahun 2017, mahasiswa STEKOM Semarang. Dengan judul penelitian “Analisis Implementasi SMS Gateway sebagai Auto Respon dari Layanan Informasi Berbasis *Store and Reward*”. Dalam penelitian ini menggunakan metode Riset dan Pengembangan (R&D).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi *SMS Gateway* yang dibuat memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi yang ter *update* sesuai dengan yang diinginkan mulai dari informasi produk, stok produk, informasi promo, informasi spesifikasi dan membantu dalam memesan produk bagi pelanggan yang sudah terdaftar. Memudahkan *Customer service* dalam hal melaksanakan tugasnya untuk melayani pelanggan baik secara sistem maupun secara personal sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi yang valid (Silalahi dan Koerniawan,2017:37).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Veronica A. Kummurur, Rosyani dan Maria Ratnaningsih pada tahun 2008, staf pengajar Universitas Sam Ratulagi Manado. Dengan judul penelitian “Penerapan *E-Government*, Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di Indonesia”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *e-government* dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia akan mampu membantu

terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*), di mana penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menjamin kondisi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik pula. Lingkungan yang baik di mana terdapat kualitas sumberdaya alam yang baik dan akan menjamin kesejahteraan masyarakat suatu negara (Kumumur, dkk,2008:20).

9. Penelitian yang dilakukan oleh Vita Elysia, Ake Wihadanto serta Sumartono pada tahun 2017. Mahasiswa Universitas Terbuka tenggerang Selatan. Dengan judul “Implementasi *e-Government* untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Terintegrasi di Indonesia. Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan *Smart City*”.

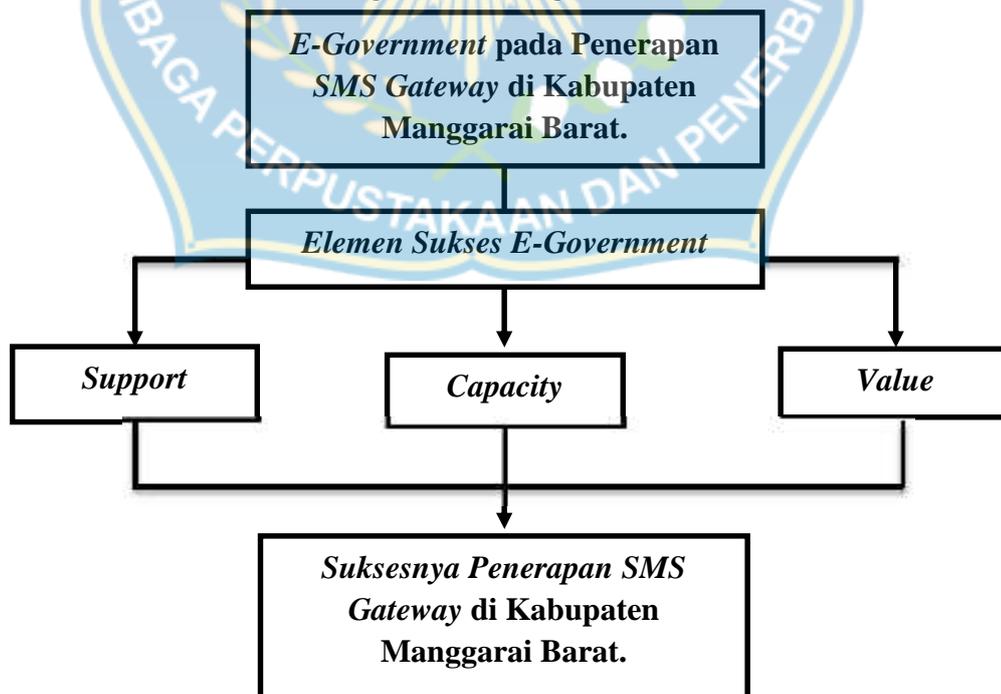
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada intinya pemerintahan digital atau *e-government* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya memberi pelayanan terhadap masyarakat secara lebih efektif. Di Indonesia *inovasi e-government* sudah banyak pemerintah daerah yang berinisiasi menerapkan *e-government*. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia, semakin berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan public serta membantu proses penyampaian informasi yang lebih efektif kepada masyarakat (Elysia, dkk, 2017:25).

C. Kerangka Pikir

Menyadari akan pentingnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan serta sebagai daerah destinasi wisata prioritas nasional yang

mendapatkan sertifikat adipura dan laporan kinerja pemerintahan (LAKIP) bernilai baik. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan berbagai program dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah meluncurkan aplikasi *SMS Gateway* melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat, untuk mempermudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat untuk memperoleh informasi tentang kepegawaian terkait dengan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, hanya menggunakan sebuah peralatan *mobile* (HP, Smartphone, dan sebagainya) yang mempunyai fitur SMS. Maka melalui penelitian ini, akan kita deskripsikan bagaimana *e-government* pada penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat dengan pendekatan teori dari Prof. Richardus Eko Indrajati tentang elemen (*indikator*) sukses pengembangan *e-government*.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir.



D. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah bagaimana *e-government* serta apa faktor pendukung pada penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat.

E. Deskripsi Fokus

1. E-Government yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis (menggunakan) elektronik di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Elemen sukses *e-government* pada penerapan *SMS Gateway* adalah:
 - a. *Support*, yang dimaksud adalah unsur dukungan dari pemimpin-pemimpin pemerintah mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, meliputi:
 - 1) Disepakatinya kerangka *SMS Gateway* sebagai suatu kunci kesuksesan negara dalam menggapai visi dan misi bangsa di Kabupaten Manggarai Barat.
 - 2) Dialokasikannya sejumlah sumberdaya (manusia, waktu, informasi, dan lain-lain) disetiap level pemerintahan untuk membangun dengan semangat lintas sektoral di Kabupaten Manggarai Barat.
 - 3) Dibangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat.

- 4) Disosialisasikannya konsep *SMS Gateway* secara merata, terus-menerus, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Manggarai Barat.
- b. *Capacity*, yang dimaksud adalah unsur keberdayaan dari pemerintah terkait penyelenggaraan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat. meliputi:
- 1) Ketersediaan sumber daya yang cukup guna melaksanakan berbagai inisiatif *SMS Gateway*, terutama dalam hal sumber daya finansial di Kabupaten Manggarai Barat.
 - 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dalam penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat.
 - 3) Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi serta keahlian yang sangat dibutuhkan agar penerapan *SMS Gateway* dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan di Kabupaten Manggarai Barat.
- c. *Value*, yang dimaksud adalah unsur manfaat dari program *SMS Gateway* yang dirasakan oleh pegawai di Kabupaten Manggarai barat, meliputi:
- 4) Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan dalam penerapan *SMS Gatewai* di Kabupaten Manggarai Barat.
 - 5) Bagaimana layanan *SMS Gateway* tersebut bisa diakses di kabupaten Manggarai Barat.

6) Kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan SMS Gateway di kabupaten Manggarai Barat.

3. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat.
4. Penerapan *SMS Gateway* yang dimaksud adalah bentuk pengelolaan aplikasi *SMS Gateway* yang dilakukn pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di kator Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan sejak bulan Mei samapai bulan Juli 2019, di kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan aplikasi *SMS Gateway* diluncurkan dan dikelola oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian, pada penelitian ini adalah kualitatif, artinya penelitian ini didasarkan pada data yang dihasilkan dari observasi, wawancara dengan informan, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau realitas penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat dengan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah proses mendapatkan data dari subjek dan objek penelitian. Data yang dimaksud digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Penggolongan ini dilakukan untuk menjaga keakuratan serta relevansi data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber datanya sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan dari pihak pertama, yaitu data dari informan dan lokasi penelitian tanpa melalui perantara. Data ini berkaitan langsung dengan informan serta diperoleh dari hasil pengamatan langsung di kantor BKPPD Kabupaten Manggarai Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari pihak ke dua, ketiga dan seterusnya. Misalnya data dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan memperoleh dan mengumpulkan data-data dari informan secara tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan ada dua yaitu informan kunci atau *key* informan dan informan sekunder (*secondary*

informan). Informan kunci ialah informan yang dianggap mengetahui dan menguasai objek penelitian. Sedangkan informan sekunder digunakan untuk melengkapi informasi atau data-data tentang objek penelitian untuk memperkaya analisis, namun tidak mesti ada.

Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*, artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui persoalan penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat. Adapun informan dalam penelitian ini ialah:

Tabel, 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	JUMLAH
1	Ir. Sebastinus Wutung	SW	Ketua BKPPD	1
2	Faraniska W. Setiawan,ST	FWS	Sub Bidang INKA BKPPD	1
3	Aleksius Arjoni Ngampu,SE	AAN	Sub Bidang Mutasi BKPPD	1
4	Nurdin Maci	NM	Pensiunan PNS	1
5	Nurisma	N	PNS	1
6	Nur Amri	NA	PNS	1
7	Fransiskus Warut	FW	Pensiunan PNS	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik ini berupa pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh keterangan berupa informasi, data dan fakta akurat yang berhubungan dengan penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui relevansi antara keterangan informan dengan kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat dan tetap mengontrol keabsahannya.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data ini ialah untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat dengan cara melakukan percakapan atau tanya jawab secara mendalam dan terbuka dengan informan.

3. Dokumen (Studi kepustakaan)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, artikel, skripsi, hasil penelitian yang relevan, koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat.

F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti mulai dari sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, namun analisis data yang dilakukan oleh peneliti

lebih difokuskan pada proses di lapangan dengan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif peneliti melakukannya secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas yang dilakukan peneliti dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta pola dan membuang yang tidak perlu. Dengan begitu data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data-data. Reduksi data ini akan berlanjut terus setelah penelitian di lapangan sampai pada laporan akhir lengkap disusun.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sesudah data direduksi oleh peneliti, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, bagan, hubungan antar indikator, tabel informan, gambar kerangka pikir. Dengan penyajian maka akan sangat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya.

Dalam klasifikasi analisis ini, data disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan / *Verifikasi (Conclusion Drawing)*

Setelah data disajikan dan diolah oleh peneliti, maka akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan peneliti sehingga kesimpulannya perlu diverifikasi. Kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya.

G. Keabsahan Data

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan dan reduksi data. Teknik keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan perlu data sebagai berikut :

1. Keikutsertaan peneliti di lapangan. Peneliti secara langsung ikut serta dalam proses penelitian di lapangan untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dari narasumber sebagai bentuk kepercayaan kepada subjek, bahwasannya data yang diteliti itu valid.
2. Triangulasi data merupakan teknik dalam pemeriksaan keabsahan data-data dengan menggunakan orang lain (pakar, ahli, dan kompeten) dalam melakukan pengecekan untuk perbandingan terhadap data. Triangulasi data yang digunakan ialah:
 - a) Triangulasi data dengan sumber data, yaitu membandingkan data mengecek data dengan baik tingkat kepercayaan dan akurasi data yang diperoleh dari alat dan waktu yang berbeda.

b) Triangulasi data dengan pakar/ahli yang kompeten, untuk keperluan pengecekan kembali akan derajat kepercayaan data agar tidak terjadi bias dalam proses pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.
- 2) Membandingkan pernyataan secara umum dan secara pribadi.
- 3) Membandingkan pernyataan informan dalam proses penelitian dan sepanjang waktu.

c) Triangulasi Waktu, waktu juga selalu mempengaruhi kredibilitas data-data. Oleh karena itu, dalam rangka mengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Waktu yang dimaksud disini ialah adanya batasan yang dilakukan oleh peneliti baik waktu dalam segi jam dan hari yang dilakukan pada saat penelitian, bila hasil dari pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan kembali secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian dari datanya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASA

Dalam bab ini akan dijabarkan perihal hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang terkait fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum menjabarkan atau mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Manggarai Barat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai barat sebagai lokasi atau tempat penelitian.

A. Profil Kabupaten Manggarai Barat

1. Sejarah

Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Papagarang, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longos. Luas wilayah dari Kabupaten Manggarai Barat ialah 9.450 km², terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km².

Ide pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini sudah ada dari tahun 1950-an. Ide ini dimunculkan pertama kali oleh Bapak Lambertus Kape

salah satu tokoh Manggarai asal Kempo Kecamatan Sano Nggoang yang pernah menjadi anggota Konstituante di Jakarta. Pada tahun 1963, aspirasi untuk memekarkan Kabupaten Manggarai dengan membentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Manggarai Barat mulai diperjuangkan secara formal dengan lembaga politik yaitu partai Katolik Sub komisariat Manggarai. Kemudian di Tahun 1982 Manggarai Barat diberikan status sebagai Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai bagian barat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-1355 Tanggal 11 Bulan November 1982.

Melalui pengkajian yang matang serta mempertimbangkan potensi serta luas wilayah dan kebutuhan untuk pendekatan pelayanan terhadap masyarakat maka lewat Sidang Paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2003 keinginan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat mencapai puncaknya pada saat ditetapkan UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, darinya Kabupaten Manggarai Barat telah resmi terbentuk. Kemudian pada tanggal 1 September 2003, Drs. Fidelis Pranda dipilih dan dilantik sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang bertugas mengelola pemerintahan serta mempersiapkan pilkada yang definitif. Kemudian melalui pilkada yang demokratis Bapak Drs. Fidelis Pranda dan Bapak Drs. Agustinus Ch. Dula kemudian terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang pertama. Dan pada tahun 2010, diselenggarakan proses pilkada yang kedua dan dari proses ini Bapak Drs. Agustinus Ch. Dula dan Bapak Drs. Maximus Gasa terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan wakil Bupati kedua.

Pada masa awal berdirinya Kabupaten Manggarai Barat terbagi atas 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Komodo, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Bolengg, Kecamatan Lembor, Kecamatan Welak, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Macang Pacar dan pada Tahun 2011 dimekarkan lagi menjadi 10 kecamatan yakni Kecamatan Lembor Selatan dan Kecamatan Mbeliling serta Kecamatan Ndosu. Kemudian pada Tahun 2015, diselenggarakan lagi proses pilkada yang ketiga. Dari pilkada ini Bapak Drs. Agustinus CH. Dula dengan Ibu Drh. Maria Geong, Ph.D terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati ketiga. Kemudian pada Tahun 2017 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat bertambah 2 dan menjadi 12 kecamatan.

2. Visi dan Misi

Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang dipimpin oleh Drs. Agustinus CH. Dula dan Drh. Maria Geong, Ph.D sebagai bupati dan wakil bupati periode 2015-2020 mengusung visi “*Menuju Kabupaten Manggarai Barat yang Ramah, Maju dan Sejahtera*” dan misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengembangan keterampilan dan perlindungan sosial.
- b) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berbasis agrowisata serta agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, wawasan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berbasis lingkungan.

- c) Mengembangkan infrastruktur serta konektivitas antara daerah yang mendukung pertumbuhan sektor real dan pelayanan publick.
- d) Meningkatkan kapasitas lembaga serta aparatur sipil negara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publick.
- e) Meningkatkan kesadaran terhadap hukum, politik, dan budaya serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Letak dan Luas

Kabupaten Manggarai Barat mempunyai batas-batas yakni: bagian utara berbatasan dengan lautan Flores. Bagian selatan berbatasan dengan lautan Sawu. Bagian barat dengan selat Sape. Bagian timur berbatas dengan Kabupaten Manggarai. Wilayah administratif dari Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas wilayah daratan mencapai 2.947,50 km², terdiri dari daratan Flores bagian barat dan pulau besar seperti: Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Papagarang, Pulau Longos dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya. Wilayah administrasi dari Kabupaten Manggarai Barat itu terdiri dari 12 Kecamatan yakni: Kec. Komodo, Boleng, Sano Ngoang, Mbeliling, Lembor, Wellak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndosso, Macan Pacar dan Kuwus Barat, serta Pacar.

4. Demografi

Berdasarkan data dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017, penduduk kabupaten Manggarai Barat sebanyak 256.491 jiwa, yang tersebar di 10 kecamatan dengan jmlah penduduk terbesar yakni 51.054 jiwa

mendiami kecamatan Komodo. Secara keseluruhan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 128.932 lebih banyak daripada perempuan dengan jumlah 127.559. Rasio jenis kelamin adalah 101 yang berarti dalam 100 perempuan itu terdapat 101 laki-laki.

Sedangkan jumlah penduduk menurut agama, jumlah penduduk terbesar yakni 203.533 jiwa memeluk agama Katolik dan agama Islam sebanyak 51.191 jiwa, agama Kristen sebanyak 1.513 jiwa, agama Hindu sebanyak 228 jiwa, dan agama Budha sebanyak 3 jiwa.

5. Topografi Jenis Tanah Dan Iklim

Kondisi topografi Kabupaten Manggarai Barat terbilang bervariasi berdasarkan bentuk *relief*, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan ketinggian yang bervariasi yakni kelas ketinggian kurang dari 100 mdpl sebanyak 23 %, 100 – 500 mdpl sebanyak 47 %, 500 – 1000 mdpl sebanyak 25 % dan lebih dari 100 mdpl sebanyak 3 %. Dan lebih dari 75 % ketinggian diatas 100 mdpl, kemiringan dari lerengnya bervariasi antara 0-2 %, 2-15 %, 15-40 % dan diatas 40 %. Namun secara umum wilayah dari Kabupaten Manggarai Barat bertopografi berbukit hingga pegunungan.

Iklim di Kabupaten Manggarai Barat adalah tropis. Seperti di tempat-tempat lainnya di Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat dikenal 2 musim yakni kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni hingga bulan September, arah angin berasal dari Australia dan kurang banyak mengandung uap

sehingga mengakibatkan kemarau. Sebaliknya juga pada bulan Desember hingga bulan Maret, arus angin berasal dari Samudra Asia dan Pasifik yang menyebabkan musim hujan. Keadaan ini bergantian setiap setengah tahunnya setelah melewati masa-masa peralihan di bulan April sampai Mei dan Oktober hingga Nopember. Walaupun seperti itu, dikarenakan Manggarai Barat dan NTT berdekatan dengan Australia, angin mengandung air dari Samudra Asia dan Samudera Pasifik dan di wilayah Manggarai Barat uapnya sudah berkurang. Inilah yang mengakibatkan waktu hujan di Manggarai Barat cenderung lebih sedikit dibandingkan wilayah-wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini yang kemudian membuat Manggarai Barat sebagai wilayah yang termaksud kering, dimana hanya ada 4 bulan (bulan Januari hingga bulan Maret dan bulan Desember) yang relatif basah dan ada 8 bulan relatif kering.

Besar curah hujan pertahun rata-rata sekitar 1500 mm/tahun. Curah hujan paling tinggi terdapat di pegunungan yang berketinggian 1000 mdpl, sedangkan curah hujan di daerah lainnya relatif rendah. Secara umum iklimnya adalah tropis kering dengan curah hujan yang tidak rata.

6. Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi pengembangan lahan pertanian

Pengembangan lahan pertanian di Kabupaten Manggarai Barat sangat berpeluang dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan sangat berpotensi meningkatkan perekonomian Kabupaten Manggarai Barat. Menurut data dari dinas Pangan Holtikultural dan perkebunan

Manggarai Barat 2018, hasil tanaman pangan di Kabupaten manggarai Barat pertahun 2017, yang terdiri dari padi sebanyak 242.151,20 ton, padi sawah sebanyak 216.932,30 ton, padi ladang sebanyak 25.218,90 ton, jagung sebanyak 16.374,70 ton, kedelai sebanyak 854,2 ton, kacang tanah sebanyak 2.237,8 ton, ubi kayu sebanyak 34.422,48 ton dan ubi jalar sebanyak 15.847,70 ton.

b. Potensi pengembangan lahan Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu sector yang mendukung perekonomian di Kabupaten Manggarai Barat. Produksi perkebunan pertahun 2017 menurut data dari Dinas Pangan Holtikultural dan perkebunan Manggarai Barat 2018, antara lain: kelapa sebanyak 402,28 ton, kakao sebanyak 451,69 ton, kopi sebanyak 954,49 ton, cengkeh sebanyak 411,89 ton, panili sebanyak 18,06 ton, jambu mente 376,79 ton, kemiri sebanyak 750,3 ton, pinang sebanyak 95,88, lada sebanyak 6,14 ton dan kapuk sebanyak 52,25 ton.

c. Potensi pengembangan lahan Peternakan

Peternakan merupakan salah satu sector yang mendukung perekonomian di Kabupaten Manggarai Barat. Sebagaimana data dari Dinans Peternakan mengatakan bahwa populasi ternak yang paling banyak di Manggarai Barat adalah ayam dengan jumlah 119.448 ekor pada tahun 2016. Sedangkan jenis ternak yang lainnya seperti: sapi sebanyak 16.249 ekor, kuda sebanyak 437 ekor, kerbau sebanyak 20.026 ekor, babi

sebanyak 41.985 ekor, kambing sebanyak 9.035 ekor, domba -, ayam kampung sebanyak 119.448 ekor, ayam pedaging sebanyak 139.000 ekor, dan itik manila sebanyak 901 ekor.

d. Potensi pengembangan lahan Perikanan

Sektor sumberdaya perikanan kabupaten Manggarai Barat sangat berpotensi. Dimna menurut data dari BPS Manggarai Barat, jumlah perahu penangkap ikan pada tahun 2015 sebanyak 2.96 unit dengan rincian sebagai berikut: perahu motor sebanyak 1.099 unit, perahu motortempel sebanyak 253 unit, dan kapalmotor sebanyak 1.615unit. Sedangkan jumlah nelayan dan petani ikan tahun 2015 sebanyak 8.544 orang, dan produksi ikan segar sebanyak 49.872,0 ekor.

e. Potensi pengembangan lahan kehutanan

Kabupaten Manggarai Barat memiliki hutan sebanyak 275.489,60 Ha, dengan luas kawasan hutan fungsi menurut fungsi hutan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015 seluas 275.489,60. Dengan luas hutan produksi terbatas sebanyak 38.039,37 Ha dan luas hutan produksi seluas 19.621,80 Ha.

7. Potensi Sumber Daya Pariwisata

Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu daerah destinasi pariwisata Dunia memiliki potensi sumberdaya pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Manggarai Barat. Meurut data dari Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan, Kabupaten Manggarai Barat memiliki berbagai jenis destinasi wisata seperti wisata budaya dengan tarian rangkuk alu dan tari caci. Wisata alam dengan seperti pulau Tatawa Besar, Loh Buaya, Crytal Rock, Pulau Sebayur, pulau Padar, pantai Pink, pulau Kalong. Wisata Cagar Budaya seperti: Compang Nangka, Liang Panas, Kubur Tua, Watu Kina, Benteng lading, Watu Tiri, Balok dan Papan Warloka, dan lain sebagainya.

B. Profil Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Manggarai Barat. BKPPD Kabupaten Manggarai Barat yang dipimpin oleh Kepala Badan Ir. Sebastian Watung, beralamat di lantai 1 Sekertariat Daerah jalan Frans Sales Lega Labuan bajo , Kelurahan Wae Kalembu, Kecamatan Komodo, mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Adapun visi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat ialah “Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian secara proposional, responsive, dan aspirasi dengan didukung sumber daya aparatur yang berkualitas” dan misi sebagai berikut:

- a. Reformasi dan tatakelola pemerintahan.

- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur.
- c. Mendorong atau mewujudkan pembinaan karir PNS yang professional dan akuntabel.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dibidang administrasi kepegawaian melalui system aplikasi kepegawaian.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana Perbub Manggarai Barat No. 83 Tahun 2016 Tentang tugas pokok dan fungsi dan tata kerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten Manggarai Barat. BKPPD memiliki tugas pokok memimpin, membina dan mengelola sebagian kewenangan daerah dibidang manajemen kepegawaian serta melaksanakan tugas lain dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Serta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dan Sekretariat;
- b. Perumusan, penetapan, pengelolaan, pengaturan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- c. Perumusan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian bidang mutasi dan pengembangan pegawai, bidang perencanaan dan diklat, bidang INKA dan pemberhentian PNS;
- d. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;

- e. Penyelenggaraan pembinaan, pemantuan atau monitoring dan evaluasi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- f. Pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas serta fungsinya.

3. Program Kerja

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi diatas, BKPPD Kabupaten Manggarai Barat memiliki program kerja sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- c. Program pendidikan kedinasan
- b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

4. Struktur Organisasi

Sebagaimana pasal 6 ayat (3) Perbup Manggarai Barat No. 38 Tahun 2016, perihal kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, struktur organisasi BKPPD Manggarai Barat sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub bagian program, keuangan dan pelaporan; dan

- 2) Sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan
- c. Bidang bidang informasi kepegawaian (INKA) dan pemberhentian PNS, membawahi :
 - 1) Sub bidang INKA;
 - 2) Sub bidang pengelolaan tata naskah pegawai; dan
 - 3) Sub bidang pembinaan dan pemberhentian PNS;
- d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub bidang mutasi
 - 2) Sub bidang kepangkatan
 - 3) Sub bidang pengembangan dan kesejahteraan pegawai
- b. Bidang Perencanaan dan Diklat membawahi :
 - 1) Sub bidang perencanaan dan formasi pegawai
 - 2) Sub bidang program pendidikan dan pelatihan pegawai
 - 3) Sub idang teknis fungsional atau pengajaran
- c. Kelompok jabatan fungsional.

C. Program *SMS Gateway* Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

1. Profil *SMS Gateway*

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat lewat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melounching aplikasi *SMS Gateway* yang terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara. Program *SMS Gateway* adalah penerapan aplikasi *SMS Gateway* di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) di Kabupaten Manggarai Barat.

SMS Gateway merupakan suatu platform yang dibuat dalam rangka menyediakan mekanisme untuk mengirim dan menerima SMS dari peralatan *mobile* (HP, Smartphone, dan lain-lain) dengan *keyword* tertentu. Dalam konsep *e-government*, aplikasi *SMS Gateway* ini termaksud dalam jenis pelayanan *interact*. Pelayanan jenis *interact* ini adalah jenis pelayanan yang sifatnya pasif dan terjalin komunikasi dua arah antar pemerintah dengan pihak yang berkepentingan untuk kemudian melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu.

Secara umum *SMS Gateway* ini ialah suatu sistem yang digunakan untuk memudahkan PNS di Kabupaten Manggarai Barat untuk memperoleh informasi-informasi tentang kepegawaian dengan hanya menggunakan sebuah HP yang memiliki fitur SMS. Format *SMS Gateway* pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dirilis pada tanggal 21 Desember 2018, untuk sementara hanya format Kenaikan Pangkat dan Pensiun yang dapat diakses.

2. Cakupan Layanan SMS Gateway

Adapun cakupan layanan SMS Gateway ini antara lain layanan kenaikan pangkat (KP) dan layanan pensiunan (PENS). Untuk informasi KP (Kenaikan Pangkat), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat langsung membuka sms lalu mengetik KP (Spasi) NIP Baru. Contoh KP 194201032017061001 kemudian dikirim ke 082145554846. Untuk informasi pensiunan (PENS), PNS dapat langsung membuka sms dan mengetik PENS (Spasi) NIP Baru. Contoh PENS 194201032017061001 kemudian dikirim ke 082145554846.

Setelah mengirimkan salah satu instruksi diatas maka secara otomatis akan mendapat balasan dari system.

3. Produk *SMS Gateway*

Adapun pengakses layanan *SMS Gateway* ini semenjak dilouningnya pada bulan Desember 2018 dari dua layanan, yaitu layanan kenaikan pangkat sebanyak 31 orang dan layanan pensiunan sebanyak 21 orang. Sebagaimana table berikut:

Tabel, 4.1 Pengguna Layanan *SMS Gateway*

NO.	LAYANAN	JUMLAH PENGGUNA TAHUN 2019
1	Kenaikan Pangkat (KP)	31
2	Pensiunan (Pens)	21

4. Dasar Hukum *SMS Gateway*

Dasar hukum dari program *SMS Gateway* ini adalah UU Nomor 64 Tahun 1958 prihal Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian; UU No.14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta Peraturan Bupati Manggarai Barat No. 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja BKPPD Kabupaten Manggarai Barat.

5. Infrastruktur *SMS Gateway*

Infrastruktur penunjang penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat antara lain sebagai berikut:

Tabel, 4.2 Infrastruktur *SMS Gateway*

NO.	INFRASTRUKTUR	JUMLAH
1	PC (<i>Personal Computer</i>)	2
2	Server	1
3	Aplikasi <i>SMS Gateway</i>	1

D. *E-Government* Pada Penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat

E-Government merupakan mekanisme interaksi baru antar pemerintah bersama masyarakat serta kalangan lain yang berkepentingan (Stakeholder), melibatkan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki kualitas

pelayanan public. Atau dengan istilah lain, *e-government* adalah pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif (Indriajit,2006:8).

Aplikasi *SMS Gateway* merupakan bagian dari *e-government* yang termaksud aplikasi dalam tipe relasi *government to employees* (G-to-E), yang merupakan aplikasi yang dibuat dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di institusi sebagai pelayan masyarakat.

Penerapan aplikasi *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat sebagai bagian dari *e-government*, harus memiliki dan memperhatikan tiga elemen sukses penerapan *e-government*. Sebagaimana teori dari Indriajit (2006) untuk menerapkan *e-government* pada sector public, ada tiga elemen yang harus dimiliki dan diperhatikan. Elemen tersebut antara lain ialah: *Support* atau dukungan, *Capacity* atau keberdayaan, dan *Vaelu* atau nilai.

Maksimalisasi ketiga elemen atau indicator di atas akan menentukan sukses atau tidanya penerapan aplikasi *SMS Gateway* di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat. Hasil penelitian dan pengkajian elemen atau indikator diatas adalah sebagai berikut:

6. Support

Elemen *support* atau dukungan ini merupakan dorongan dari pimpinan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam penerapan *SMS Gateway*. Keinginan (*inten*) merupakan hal yang paling krusial dimiliki oleh pemerintah

untuk benar-benar menerapkan konsep *SMS Gateway*, bukan sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “*political will*” mustahil berbagai inisiatif pengembangan dan pembangunan *SMS Gateway* dapat berjalan dengan lancar. Dukungan ini harus berangkat dari atas, dimuli dari pemimpin pemerintahan tingkat pusat hingga tingkat daerah. Dukungan ini antara lain; 1) Disepakatinya kerangka konsep *SMS Gateway*. 2) Dialokasikannya sumber daya. 3) Dibangunnya infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung, dan disosialisasikannya konsep *SMS Gateway*.

a. Disepakatinya kerangka *SMS Gateway*

Penerapan konsep *e-government* pada prinsipnya bukanlah hal yang mudah dan murah, karna berbicara *e-government* berarti berbicara tentang penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini membutuhkan keseriusan dan keinginan yang kuat. Terutama keseriusan dan keinginan pihak pemerintah disetiap level dari tingkatan atas hingga ke bawah.

Keinginan atau *political will* dari pimpinan pemerintahan mulai dari tingkatan pusat hingga tingkatan-tingkatan bawah dalam hal keberhasilan penerapan atau pengembangan *e-government* sangatlah menentukan. Tanpa adanya keinginan pimpinan pemerintah, mustahil segala bentuk inisiatif pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan mulus. Keinginan yang kuat dari pimpinan pemerinta inilah yang kemudian

melahirkan dukungan atau *support* terhadap penerapan dan pengembangan *e-government*.

Penerapan aplikasi *SMS Gateway* di Badan Kepegawaiaan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat dalam hal persetujuan kerangka konsep, sudah disetujui dan disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini dilihat dari komentar-komentar baik dari pihak BKPPD maupun pihak pegawai di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut komentar dari beberapa informan terkait disepatkatinya kerangka konsep *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat.

Komentar dari SW selaku Kepala Badan Kepegawaiaan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat. Berikut tanggapannya:

“Berbicara persetujuan kerangka konsep *SMS Gateway*, kerangka konsep *SMS Gateway* ini sebelum dilaunching pada Desember 2018 jelas sudah disetujui oleh pimpinan Pemerintah Daerah, terutama pihak BKN Regional X sangat mendukung prihal rencana penerapan *SMS Gateway* ini, pihak BKN Regional X juga menyiapkan *software* aplikasi dan teknisi untuk penerapan *SMS Gateway*” (Hasil wawancara dengan SW, kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 12 Juni 2019, Pukul 10:30 pagi di Kantor BKPPD)

Dari komentar informan diatas dapat diketahui bahwa *SMS Gateway* dilaunching pada bulan Desember 2018 dan telah disetujui kerangka konsep awalnya oleh pimpinan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, informan yang lain juga menyampaikan komentar senada terkait

hal persetujuan dan dukungan tentang kerangka konsep *SMS Gateway* ini sebagai berikut:

“Pemda Kabupaten Manggarai Barat terkhusus Bapak Bupati sendiri, sangat mendukung. Apalagi kalau program-program yang bersifat *e-government*. Belakangan ini ada beberapa aplikasi dan kanal yang diluncurkan, seperti e-Plening dan sebagainya. Pak Bupati juga diakhir tahun lalu (Desember 2018) sudah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* kerjasama dengan Pemda Batang. Beberapa hal ini menandakan betapa keinginan dan keseriusan pak Bupati kita dalam hal penerapan dan pengembangan *e-government*” (Hasil wawancara dengan FWS, Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 17 Juni 2019, pukul 14:00 siang di Kantor BKPPD)

Menganalisis komentar dari informan diatas, dapat diketahui bahwa Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan BKN Regional X selaku lembaga pemerintah Non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang Manajemen Kepegawaian Negara, telah menyetujui kerangka konsep *SMS Gateway* sehingga dapat dilounching pada bulan Desember 2018.

Disamping itu, informan yang lain juga memberikan komentar yang senada, disampaikan oleh AAN selaku kepala sub bidang mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Berikut komentarnya:

“Sejauh ini, Pemerintahan Daerah terkhusus pak Bupati sendiri sangat antusias dalam pembangunan dan pengembangan system pelayanan publik yang berbasis elektronik. Hal ini dapat kita lihat pada situs resmi Pemda Kabupaten Manggarai Barat yaitu www.manggarai Barat kab.go.id itu sudah bagus dan lumayan lengkap informasi-informasi di dalamnya. Dan juga banyak juga langkah-langkah yang dilakukan pak Bupati dalam menerapkan dan mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis elektronik, seperti kerja sama dengan Pemda Kabupaten Batang. Begitupun dengan BKN Regional X, ketika kami bersurat terkait rencana penerapan *SMS*

Gateway ini mereka merespon dengan cepat dan menyetujui hal tersebut” (Hasil Wawancara dengan AAN, selaku sub bagian mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 18 Juni 2019, pukul 10:30 di kantor BKPPD)

Menganalisis komentar dari informan di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sangat antusias dengan penerapan *e-government* atau penerapan layanan yang berbasis elektronik di Kabupaten Manggarai Barat.

Kemudian komentar dari informan NM yang merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Manggarai Barat. beliau berkomentar sebagai berikut:

“Saya perhatikan ditahun 2018 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah mulai serius untuk mengembangkan pelayanan public berbasis teknologi, sekarang kita sudah bisa mendapatkan informasi kepegawaian melalui internet dan sms saja, kita mengakses di website pemda” (Hasil wawancara dengan NM salah satu PNS di lingkup Kabupaten Manggarai Barat, 24 Juni 2019 di rumahnya pukul 15:00 sore)

Dari uraian hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait *e-government* sudah mulai serius, sehingga layanan informasi berbasis teknologi informasi di Kabupaten Manggarai Barat terlihat dengan adanya website resmi pemda.

b. Pengalokasian sumber daya (manusia, waktu, informasi dan lain-lainnya)

Pengalokasian sumber daya manusia, waktu, dan informasi yang dimaksud disini merupakan hal yang sangat mendukung dalam tahap awal

pembangunan *SMS Gateway*. Pengalokasian sumber daya manusia, waktu dan informasi dari pimpinan pemerintah harus jelas dan konkrit.

Dukungan sumber daya dari Pimpinan Pemerintah Daerah dalam penerapan *SMS Gateway* di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manggarai Barat ini, pihak yang terkait disini adalah BKN Regional X yang menyediakan *software* dan teknisinya. Hal ini sebagaimana komentar informan-informan terkait dukungan sumber daya infrastruktur penunjang penerapan *SMS gateway*.

Komentar dari SW selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat. Berikut komentarnya:

“dukungan sumber daya manusia, informasi dan teknologi dalam penerapan *SMS Gateway ini*, disediakan oleh BKN Regional X berupa menyiapkan *software* aplikasi dan teknisi serta tim sosialisasi untuk penerapan *SMS Gateway*” (Hasil wawancara dengan SW, kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 12 Juni 2019, Pukul 10:30 pagi di Kantor BKPPD)

Dari komentar kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat di atas dapat diketahui bahwa dukungan sumberdayaa manusia, teknloogi dan iniformasi dalam penerapan *SMS Gateway* ini diberikan oleh BKN Regional X. dimana bentuk dukungannya berupa diberikannya aplikasi *SMS Gateway*, teknisi dan tim untuk mensosialisasikan aplikasi *SMS Gateway*.

Informan yang lain juga menyatakan komentar yang sama terkait dukungan sumber daya dalam penerapan *SMS Gateway*. Berikut komentar

dari AAN selaku Sub Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, penjelasannya sebagai berikut:

“Sejak awal kami bersurat kepada BKN regional X terkait niat kami untuk menerapkan *SMS Gateway* ini, respon BKN Regional X sangat baik. Tidak lama setelah surat kami masuk, mereka mengundang kami untuk rapat perihal *SMS Gateway* ini dan disitulah mereka menyampaikan dukungan dan kesediaan mereka untuk menyiapkan *software* dan teknisi dalam pengadaan aplikasi *SMS Gateway* ini” (Hasil wawancara dengan AAN selaku Sub Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 18 Juni 2019 di kantor BKPPD pukul 10:30 pagi)

Dari komentar diatas, dapat diketahui bahwa pimpinan BKN Regional X sangat mendukung penerapan *SMS Gateway* dan menyediakan sumber daya manusia berupa teknisi untuk keperluan penerapan *SMS Gateway*. Komentar yang senada juga disampaikan oleh FWS selaku Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Berikut komentarnya:

“Terkait dukungan sumber daya manusia dalam penerapan *SMS Gateway* ini, dari pihak BKN Regional X menyiapkan teknisi untuk memasang server dan aplikasi pada computer di kantor kami, serta mengutus tim untuk ikut serta dalam sosialisasi penerapan *SMS Gateway*. saya rasa dukungan sumber daya ini sudah cukup dalam penerapan *SMS Gateway*” (Hasil wawancara dengan FWS, Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 17 Juni 2019, pukul 14:00 siang di Kantor BKP PD)

Dari komentar hasil wawancara dari informan diatas, dapat diketahui bahwa dalam hal dukungan alokasi sumber daya manusia dari pimpinan pemerintah dalam hal ini sudah ada. Dimana BKN Regional X sebagai pelaksana tugas pemerintah di bidang manajemen kepegawaian Negara di tingkat Kabupaten atau Kota sudah mengalokasikan aplikasi, teknisi dan tim untuk mensosialisasian *SMS Gateway* dan ini dirasakan cukup dalam

hal sumber daya manusia, teknologi dan informasi. Informan yang lain juga berkomentar yang mendukung komentar-komentar sebelumnya, N yang merupakan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut komentarnya:

“saya melihat dukungan dari pimpinan Pemerintah Daerah ketika launching *SMS Gateway* yang dirangkaikan dengan Sosialisasinya itu dihadiri oleh beberapa pimpinan SKPD terutama pejabat BKN yang sekaligus menjadi pemateri dalam sosialisasinya” (Hasil wawancara dengan N salah satu PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 26 Juni 2019 di rumahnya pukul 16:00 sore)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dukungan alokasi sumberdaya manusia, teknologi dan informasi dalam penerapan *SMS Gateway* ini sudah dialokasikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat.

c. Dibangunnya infrastruktur dan superstruktur yang mendukung

Infrastruktur dan superstruktur merupakan dua hal yang sangat mendukung pelaksanaan konsep *e-government* untuk terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan *e-government*, seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas dan ditugaskannya lembaga-lembaga khusus sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya.

Dukungan infrastruktur dari pihak pimpinan pemerintah terkait peneapan *SMS Gateway* ini, dari pihak BKN Regional X telah disediakan

software aplikasi *SMS Gateway* sedangkan dari Pemerintah Daerah lewat pejabat pengadaan Barang menyiapkan hardware berupa PC dan server untuk pengelolaan *SMS Gateway*. Sedangkan dukungan suprastruktur terkait *e-government* secara umum dan *SMS Gateway* secara khusus di Kabupaten Manggarai Barat dikatakan belum ada. Hal ini sebagaimana komentar dari beberapa informan terkait dukungan infrastruktur dan superstruktur.

Komentar dari SW selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat. Berikut tanggapannya:

“kalau soal dukungan infrastruktur itu ada dari pihak BKN Regional X berupa aplikasi *SMS Gateway* dan dari pejabat pengadaan barang berupa PC dan server. Sedangkan kalau undang-undang atau regulasi tentang *e-government* secara umum di Kabupaten Manggarai Barat itu belum ada” (Hasil wawancara dengan SW, kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 12 Juni 2019, Pukul 10:30 pagi di Kantor BKPPD)

Dari hasil wawancara dengan kepala BKPPD diatas dapat diketahui bahwa dalam dukungan infrastruktur, pihak BKN regional X telah menyiapkan Aplikasi *SMS Gateway* dan pihak Pejabat pengadaan barang mengadakan PC dan server. Sedangkan dalam hal dukungan superstruktur berupa undang-undang atau regulasi terkait penerapan *e-government* secara umum dan penerapan *SMS Gateway* secara khusus di Kabupaten Manggarai Barat belum ada dari pimpinan pemerintah daerah.

Komentar senada juga disampaikan oleh AAN selaku Sub Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, penjelasannya sebagai berikut:

“Dukungan infrastruktur dan suprastruktur penunjang penerapan *SMS Gateway* dari pimpinan pemerintah sudah ada berupa PC dari Pejabat Pengadaan Barang dan aplikasi dari pihak BKN regional X. dan peraturan khusus terkait penerapan *SMS Gateway* ini belum ada, mungkin kedepan dan ini harapan kami kepada pemda untuk kemudian dibuatkan peraturan khusus tentang pelayanan public berbasis teknologi informasi” (Hasil wawancara dengan AAN selaku Sub Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 18 Juni 2019 di kantor BKPPD pukul 10:30 pagi)

Selain itu, komentar yang mendukung juga disampaikan oleh FWS selaku Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Penjelasannya sebagai berikut:

“dalam hal penerapan *SMS Gateway* membutuhkan infrastruktur berupa aplikasi *SMS Gateway*, PC dan server. Dukungan infrastruktur sudah ada berupa PC dan aplikasi, disiapkan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan BKN Regional X. kalau soal superstrukturnya yang berupa perbup atau perda tentang penerapan *e-government* dan *SMS Gateway* itu belum adadi Kabupaten Manggarai Barat” (Hasil wawancara dengan FWS, Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 17 Juni 2019, pukul 14:00 siang di Kantor BKP PD)

Menganalisis dua komentar hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dalam hal dukungan Infrastruktur dan suprastruktur penerapan *SMS Gateway* ini sudah memberikan dukungan berupa penyediaan PC dan aplikasi *SMS Gateway* serta server, namun belum serius dalam dukungan superstruktur dengan belum adanya peraturan terkait penerapan *e-government* dilingkup Pemerintahan Kabupaten

Manggarai Barat. hal ini juga didukung oleh komentar dari salah satu pegawai selaku informan.

Berikut komentar dari NA salah satu PNS di Kabupaten Manggarai Barat. Komentarnya sebagai berikut:

“setau saya di Kabupaten Manggarai Barat ini belum ada regulasi atau aturan yang jelas tentang penerapan e-government. Namun belakangan ini ada beberapa aplikasi pelayanan yang dilouning, mungkin kedepan aka nada aturannya” (Hasil wawancara dengan NA salah satu PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 25 Juni 2019 di rumahnya pukul 15:00 sore)

d. Disosialisikannya konsep SMS Gateway.

Dukungan sosialisasi aplikasi *SMS Gateway* yang dimaksud disini adalah keterlibatan pimpinan pemerintah dalam mensosialisasikan aplikasi *SMS Gateway* ini. Sosialisasi aplikasi *SMS Gateway* ini dilakukan oleh pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barait pada saat *louning* pada bulan Desember 2018 yang dihadiri oleh pimpinan BKN Regional X dan perwakilan dari beberapa pimpinan SKPD dan pegawainya. Hal menandakan adanya keterlibatan Pimpinan Pemerintah. Hal ini sebagaimana penjelasan beberapa informan sebgai berikut:

Komentar dari SW selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat. Berikut tanggapannya:

“sosialisasi aplikasi *SMS Gateway* inidilakukan pada saat dilounching bulan Desember 2018 dan dihadiri oleh pejabat BKN Regional X sekaligus menjadi pemateri tentang *SMS Gateway*. disamping itu, Aplikasi *SMS gateway* ini juga disosialisasikan lewat situs/website resmi pemda” (Hasil wawancara dengan SW, kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 12 Juni 2019, Pukul 10:30 pagi di Kantor BKPPD)

Dari komentar hasil wawancara dengan kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat diatas dapat diketahui bahwa pimpinan daerah terlibat sosialisasi dan mensosialisasikan *SMS Gateway* lewat website resmi pemda.

Informan lain juga berkomentar yang senada. Berikut komentar dari AAN selaku Sub Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, penjelasannya sebagai berikut:

“Yang terlibat dalam sosialisasi yang dirangkaikan lounching *SMS Gateway* ini pada Desember 2019 yang lalu itu ada BKN Regional X, Beberapa Pimpinan SKPD dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS)” (Hasil wawancara dengan AAN selaku Sub Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 18 Juni 2019 di kantor BKPPD pukul 10:30 pagi)

Selain itu komentar yang senada juga disampaikan oleh FWS selaku Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Penjelasannya sebagai berikut:

“Sosialisasi aplikasi ini dirangkaikan dalam lounching aplikasi *SMS Gateway* yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018 yang dihadiri oleh Pimpinan BKN Regional X dan Beberapa Pimpinan SKPD dan pegawainya” (Hasil wawancara dengan FWS, Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 17 Juni 2019, pukul 14:00 siang di Kantor BKP PD)

Dari beberapa penjelasan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dukungan dari pimpinan pemerintah dalam bentuk

keterlibatannya dalam sosialisasi dan mensosialisasikan *SMS Gateway* sudah ada dan dilakukan ketika launching yang dirangkaikan dengan sosialisasi *SMS Gateway* serta mensosialisasikan dalam bentuk berita di *website* resmi pemda. hal ini didukung oleh komentar dari FW salah satu PNS di kabupaten Manggarai Barat. Berikut komentarnya:

“informasi tentang *SMS Gateway* ini saya dapatkan dari website resmi pemda yaitu www.mabarkab.go.id dalam bentuk berita tentang launching dan sosialisasi *SMS Gateway* dan dari situlah saya mengetahui layanan kepegawaian melalui *SMS Gateway*” (Hasil wawancara dengan FW, salah satu PNS di Kabupaten Manggarai Barat, 24 Juni 2019 Pukul 09:30 pagi di kediamannya)

7. Capacity

Capacity, merupakan adanya keberdayaan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menggapai impian *e-government* menjadi sebuah kenyataan. Ada tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan hal ini yaitu: 1) Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan konsep *SMS Gateway*, terutama dalam hal sumber daya finansial. 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dalam penerapan aplikasi *SMS Gateway*. 3) Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkopetensi serta keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *SMS Gateway* dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

a. Ketersediaan sumber daya finansial

Sumber daya finansial atau anggaran menjadi faktor yang penting dalam proses pelaksanaan *e-government*. Untuk dapat melaksanakannya, dibutuhkan anggaran yang cukup besar baik pada tahap persiapan maupun

pada tahap pelaksanaan. Anggaran yang dimaksud disini adalah anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan dan pengelolaan aplikasi *SMS Gateway* di badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah BKPPD Kabupaten Manggarai Barat.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dalam penerapan *SMS Gateway* ini telah menyiapkan atau menganggarkan anggaran pengadaan dan pengelolaan aplikasi *SMS Gateway* ini dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini sebagaimana penjelasan beberapa informan terkait ketersediaan sumberdaya finansial dalam penerapan *SMS gateway*.

Komentar dari SW selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat. Berikut tanggapannya:

“Kalau soal finansial atau pembiayaan untuk pengelolaan aplikasi *SMS Gateway* ini kami sudah alokasikan penganggarnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPPD Kabupaten Manggarai Barat” (Hasil wawancara dengan SW, kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 12 Juni 2019, Pukul 10:30 pagi di Kantor BKPPD)

Menganalisis komentar dari informan di atas, dapat kita ketahui bahwa pengelolaan aplikasi *SMS Gateway* di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat sudah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPPD.

Informan lainnya juga berkomentar yang sama terkait penganggaran pengelolaan aplikasi *SMS Gateway* di BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Berikut penjelasan dari FWS selaku Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Berikut penjelasannya:

“Segala pembiayaan terkait aplikasi *SMS Gateway* disiapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah kabupaten Manggarai Barat” (Hasil wawancara dengan FWS, Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 17 Juni 2019, pukul 14:00 siang di Kantor BKPPD)

Komentar yang sama dan mendukung kometar diatas di sampaikan oleh AAN selaku sub Bagian Mutasi BKPPD kabupaten Manggarai Barat.

Komentarnya sebagai berikut:

“Terkait pengalokasian dana atau anggaran untuk pengadaan dan pengelolaan aplikasi *SMS Gateway* ini, jelas sudah kami anggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) BKPPD” (Hasil Wawancara dengan AAN, Sub Bagian Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 18 Juni 2019, pukul 10:30 di kantor BKPPD)

Dari wawancara dengan beberapa informan dari pihak BKPPD diatas, dapat kita simpulkan bahwa ketersediaan sumber daya finansial terkait pengadaan dan pengelolaan aplikasi *SMS Gaateway*, sudah kemudian dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah kabupaten Manggarai Barat. hal ini juga diperkuat oleh komentar NM yang merupakan salah satu PNS di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut komentarnya:

“kalau masalah keberdayaan finansial dari BKPPD untuk mengelola aplikasi SMS Gateway, saya rasa pasti sudah dianggarkan. Setau saya setiap program itu sebelum diterapkan pasti sudah dianggarkan dalam rencana kerja dan anggarannya” (Hasil wawancara dengan NM salah satu pensiunan PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 24 Juni 2019 di rumahnya pukul 15:00 sore)

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi

Penyediaan infrastruktur atau peralatan teknologi merupakan salah satu unsur keberdayaan atau *capacity* dari pemerintah setempat selaku pelaksana dalam rangka menlajankan program *e-government*. Pada prinsipnya suatu program kebijakan tidak dapat berjalan tanpa adanya infrastruktur atau peralatan yang memadai dari pihak pelaksana dalam menjalankan suatu program.

Dalam hal ketersediaan infrastruktur atau peralatan penunjang penerapan *SMS Gateway* oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat, pihak BKPPD Kabupaten Manggarai Barat telah disediakan *software* berupa aplikasi dan *hardware* berupa PC serta servernya.

Komentar dari SW selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat. Berikut tanggapannya:

“dalam hal keberdayaan infrastruktur teknologi informasi, jelas kami dari BKPPD selaku pengelola sudah kami sediakan. Dalam menerapkan aplikasi *SMS Gateway* juga hanya membutuhkan infrastruktur berupa PC, aplikasi dan server. Ketersediaan infrastruktur ini berkat dukungan dari pimpinan pemerintah daerah dan pimpinan instansi terkait kepegawaian” (Hasil wawancara dengan SW, kepala

BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 12 Juni 2019, Pukul 10:30 pagi di Kantor BKPPD)

Menganalisis komentar dari kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat diatas, dapat kita ketahui bahwa infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan dalam penerapan *SMS Gateway* ialah Aplikasi *SMS Gateway*, PC dan server.

Informan yang juga memberikan komentar yang sama terkait keberdayaan infrastruktur dedalam penerapan *SMS Gateway*. Berikut komentar dari AAN selaku sub Bagian Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat:

“Dalam hal infrastruktur penunjang penerapan *SMS Gateway* ini tidak terlalu banyak, hanya membutuhkan PC, aplikasi *SMS Gateway* dan servernya, dan semuanya telah kami siapkan sebelum aplikasi *SMS Gateway* ini dilounching Desember 2018 lalu” (Hasil Wawancara dengan AAN, sub bagian mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 18 Juni 2019, pukul 10:30 di kantor BKPPD)

Dari penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa dalam penerapan aplikasi *SMS Gateway* ini hanya membutuhkan infrastruktur berupa PC, aplikasi dan server. PC, aplikasi dan server ini telah disediakan oleh BKPPD. Komentar yang senada juga disampaikan oleh informan lainnya dari pihak BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Penjelasan nya sebagai berikut:

“Dalam menerapkan *SMS Gateway* ini, tentu kami telah menyiapkan infrastruktur penunjangnya. Seperti PC khusus dan aplikasi serta servernya” (Hasil wawancara dengan FWS, Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 17 Juni 2019, pukul 14:00 siang di Kantor BKPPD)

Menganalisis penjelasan dari hasil wawancara dari beberapa informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur di BKPPD terkait penerapan *SMS Gateway* ini sudah kemudian dipersiapkan. Hal ini diperkuat oleh komentar dari informan N yang merupakan salah satu PNS di Kabupaten Manggarai Barat . Komentarnya sebagai berikut:

“sepengetahuan saya, aplikasi *SMS Gateway* dikelola di kantor BKPPD dan pihak BKPPD sendiri pasti sudah menyiapkan alat-alat untuk pengelolaan aplikasi *SMS Gateway* itu sendiri” (Hasil wawancara dengan N salah satu PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 26 Juni 2019 di rumahnya pukul 16:00 sore)

c. Ketersediaan sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur dari keberdayaan pihak yang menerapkan dan mengelola *e-government*. Dalam pengelolaan aplikasi *SMS Gateway*, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat dalam pengelola aplikasi *SMS Gateway* telah membentuk tim khusus. Tim pengelola aplikasi *SMS Gateway* ini dipimpin oleh kepala Sub Bidang INKA, Ibu Fransiska W. Setiawan, ST.

Tim pengelola aplikasi *SMS Gateway* ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini sebagaimana komentar dari beberapa informan terkait ketersediaan sumber daya manusia dalam penerapan *SMS Gateway*. Komentarnya sebagai berikut:

Komentar dari SW selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat. Berikut tanggapannya:

“Kalau soal ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan aplikasi *SMS Gateway* ini, kami telah membentuk tim khusus mengelola dan memantau aplikasi *SMS Gateway*, tim khusus ini diketuai oleh Ibu Siska sub bidang INKA” (Hasil wawancara dengan SW, kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 12 Juni 2019, Pukul 10:30 pagi di Kantor BKPPD)

Dari hasil wawancara dengan kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat diatas, dapat kita ketahui bahwa BKPPD selaku pengelola aplikasi *SMS Gateway* dalam hal sumber daya manusia telah membentuk tim khusus untuk mengelola dan memantau aplikasi *SMS Gateway* di kantor BKPPD dan tim khusus ini diketui oleh kepala sub Bidang INKA yaitu Ibu Farnsiska W. Setiawan,ST. Komentar yang senada juga disampaikan oleh informan AAN selaku ketua sub Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Komentarnya sebagai berikut:

“Kami sendiri dari BKPPD dalam hal sumberdaya manusia telah membentuk tim untuk mengelola dan memantau perkembangan *SMS Gateway*” (Hasil Wawancara dengan AAN, sub bagian mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 18 Juni 2019, pukul 10:30 di kantor BKPPD)

Informan yang lain juga menyampaikan komentar yang senada terkait hal ketersediaan sumber daya manusia dalam penerapan *SMS Gateway*. Berikut komentar dari FWS selaku ketua Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Penjelasannya sebagai berikut:

“SDM yang kemudian mengelola aplikasi *SMS Gateway* ini adalah tim yang dibentuk khusus untuk mengoperasikan aplikasi *SMS Gateway*. Tim ini dipimpin oleh saya sendiri” (Hasil wawancara dengan FWS,

Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 17 Juni 2019, pukul 14:00 siang di Kantor BKPPD)

Hal ini juga diperkuat dengan komentar salah satu informan, FW yang merupakan salah satu pensiunan PNS di Kabupaten Manggarai Barat.

Berikut komentarnya:

“Pelayana melalui sms gateway ini sangat memudahkan kami selaku pegawai yang ingin mengurus, namun baru urus pensiunan sama kenaikan pangkat yang bisa dilakukan lewat sms. Mungkin bisa nanti BKPPD kedepan dikembangkan lagi supaya lebih banyak lagi yang bisa diurus dengan sms, lebih memudahkan” (Hasil wawancara dengan NA salah satu PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 25 Juni 2019 di rumahnya pukul 15:00 sore)

Dari uraian penjelasan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal ketersediaan SDM untuk mengelola aplikasi *SMS Gateway* ini, pihak BKPPD telah membentuk tim khusus untuk mengelola dan memantau perkembangannya.

8. *Value*

Value, merupakan nilai atau manfaat dari adanya penerapan *SMS gateway* di Kabupaten Manggarai Barat dilihat dari pihak yang diuntungkan. Pihak yang diuntungkan dalam penerapan *SMS Gateway* tersebut ialah pihak pelaksana atau instansi yang menerapkan dan pihak pegawai yang menggunakannya. Ada tiga hal yang harus dirasakan oleh pihak diuntungkan, yaitu: 1) Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan. 2) Bagaimana layanan tersebut bisa diakses. 3) Kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut.

a. Cakupan layanan

Pada prinsipnya, *e-government* dalam penerepanya dapat dilihat ada beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jenis-jenis pelayanan public dalam *e-government* dapat dikelompokkan dengan dua aspek, yaitu: pertama aspek kompleksitas, yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-government* yang ingin dibangun dan diterapkan. Dan aspek yang kedua adalah aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. Berdasarkan dua aspek inilah *e-government* dapat dibagi menjadi tiga jenis pelayanan utama *e-government*, yaitu: pertama *publish*, yaitu jenis pelayanan satu arah. Kedua *interack*, yaitu jenis pelayanan dua arah yang sifatnya pasif. Ketiga *transack*, yaitu jenis pelayanan dua arah yang di dalamnya terdapat transaksi uang.

SMS Gateway yang merupakan bagian dari *e-government* dan termaksud dalam jenis pelayanan *interack*. Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat menerapkan layanan *SMS Gateway* dengan dua cakupan layanan diantaranya layanan kenaikan pangkat dan layanan pensiunan. Kedua layanan *SMS Gateway* ini dirasakan sangat membantu dan memudahkan pegawai di lingkup Kabupaten Manggarai Barat. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Manggarai Barat sebagai pelaksana dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

sebagai pengguna mengharapkan untuk kedepan pelayanan *SMS Gateway* ini dikembangkan untuk melayani informasi kepegawaian lainnya dan diterapkan juga pada instansi-instansi lain. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan pihak BKPPD Kabupaten Manggarai Barat serta beberapa Pegawai Negeri Sipil.

Berikut komentar dari SW selaku Kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat terkait cakupan layanan *SMS Gateway*. Berikut komentarnya:

“cakupan layanan yang ada pada *SMS Gateway* yang kami terapkan untuk saat ini hanya mencakup layanan informasi pengurusan kenaikan pangkat dan layanan informasi pengurusan pensiunan. Cakupan layanan dari *SMS gateway* ini kedepan akan kami kembangkan untuk layanan-layanan informasi kepegawaian lainnya” (Hasil wawancara dengan SW, kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 12 Juni 2019, Pukul 10:30 pagi di Kantor BKPPD)

Dari komentar informan di atas dapat kita ketahui bahwa cakupan layanan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat untuk sementara waktu hanya mencakup layanan informasi pengurusan kenaikan pangkat dan layanan informasi pengurusan pensiunan dan kedepan akan dikembangkan lagi agar dapat mencakup layanan kepegawaian yang lainnya.

Komentar senada juga disampaikan oleh FWS selaku Kepala Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, komentarnya sebagai berikut:

“Pelayanan yang ada di *SMS Gateway* ini untuk sementara hanya bisa melayani informasi proses pensiun dan kenaikan pangkat. Kedepannya

akan dikembangkan lagi untuk melayani informasi kepegawaian lainnya” (Hasil wawancara dengan FWS, Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 17 Juni 2019, pukul 14:00 siang di Kantor BKPPD)

Komentar yang samapun dikemukakan oleh AAN selaku Kepala Sub Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat terkait layanan dari sms gateway, sebagai berikut:

“Seperti yang saya sampaikan diawala tadi, bahwa aplikasi *SMS Gateway* ini digunakan untuk keperluan memberikan informasi kepegawaian bagi PNS, terkhusus yang berada di daerah terpencil dan kepulauan yang belum terjangkau oleh jaringan internet. Dengan memanfaatkan telepon seluler pegawai dapat memperoleh dan mmengurus informasi kenaikan pangkat dan pensiunan. untuk sementara ini hanya dua layanan itu dan kedepan kami akan kembangkan hingga layanannya akan lebih banyak lagi” (Hasil Wawancara dengan AAN, selaku Kepala Sub Bagian Mutasi BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 18 Juni 2019, pukul 10:30 di kantor BKPPD)

Menganalisis hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa cakupan layanan dari sms gateway masih sebatas dua layanan informasi kepegawaian yaitu informasi kenaikan pangkat dan informasi pensiunan dan masih akan dikembangkan lagi.

Hal ini juga diperkuat dengan komentar salah satu informan, FW yang merupakan salah satu pensiunan PNS di Kabupaten Manggarai Barat.

Berikut komentarnya:

“Pelayana melalui *SMS gateway* ini sangat memudahkan kami selaku pegawai yang ingin mengurus kenaikan pangkat dan pensiunan yang bisa dilakukan lewat sms. Mungkin bisa nanti BKPPD kedepan mengembangkan lagi layanyannya supaya lebih banyak lagi yang bisa diurus dengan *SMS* dan lebih memudahkan” (Hasil wawancara dengan FW, salah satu PNS di Kabupaten Manggarai Barat. 24 Juni 2019 Pukul 09:30 pagi di kediamannya)

Menganalisis hasil wawancara dengan informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa cakupan layanan yang terimplementasikan dan dapat diakses dengan *SMS Gateway* ini sangat membantu namun cakupan layanannya masih perlu dikembangkan agar dapat memudahkan pegawai dalam memperoleh atau mengurus informasi kepegawaian yang lainnya. Hal ini diperkuat oleh komentar informan NA juga salah satu pegawai di lingkup Kabupaten Manggarai Barat. Berikut Komentarnya:

“setau saya layanan yang bisa lewat *SMS* itu hanya layanan pengurusan kenaikan pangkat dan pensiunan. Hadirnya layanan lewat *SMS* ini sangat membantu dan memudahkan kami pegawai. Namun lebih bagusnya lagi kalau layanan-layan informasi atau pengurusan kepegawaian yang lainnya juga dapat melalui *SMS*” (Hasil wawancara dengan NA salah satu PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 25 Juni 2019 di rumahnya pukul 15:00 sore)

b. Akses layanan

Penentuan jenis layanan dalam penerapan *e-governemnt* memperhatikan dua aspek, yaitu aspek kompleksitas atau kerumitan aplikasi dan aspek manfaat dari layanan itu sendiri. Manfaat dari layanan ini akan dirasakan ketika layanan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh penggunanya.

SMS Gateway hadir untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan informasi dan mengurus terkait kenaikan pangkat dan pensiunan. Bagaiman akses layanan dari *SMS Gateway* ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan pihak BKPPD dan PNS yang telah menggunakan layanan *SMS Gateway* ini.

Berikut komentar dari SW selaku Kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat terkait akses layanan *SMS Gateway*. Berikut komentarnya:

“sebagaimana tujuan diterapkannya layanan *SMS Gateway* ialah untuk memudahkan pegawai dalam memperoleh dan mengurus informasi kepegawaian di lingkup kabupaten Manggarai Barat. maka untuk mengakses layanan *SMS Gateway* ini cukup dengan HP yang memiliki fitur *SMS* dan mengirim *SMS* nomor tertentu dengan format tertentu maka akan memperoleh balasa langsung terkait informasi yang diinginkan” (Hasil wawancara dengan SW, kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 12 Juni 2019, Pukul 10:30 pagi di Kantor BKPPD)

Dari hasil wawancara dengan kepala BKPPD Kabupaten Manggarai Barat di atas dapat kita ketahui bahwa tujuan dari diterapkannya aplikasi *SMS Gateway* ini untuk kemudian dengan mudah dan hanya diakses lewat *SMS* dengan format tertentu.

Komentar yang senada juga disampaikan oleh FWS kepala Sub. Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat terkait Bagaimana akses layanan *SMS Gateway*, sebagai berikut:

“*SMS Gateway* diakses melalui telepon seluler atau HP dan akan diproses pada server aplikasi *SMS Gateway*. Pemohon informasi akan mengirimkan *SMS* pada nomor aplikasi *SMS Gateway*, selanjutnya akan dibalas secara otomatis” (Hasil wawancara dengan FWS, Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. 17 Juni 2019, pukul 14:00 siang di Kantor BKPPD)

Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya, MM salah satu pegawai di lingkup Kabupaten Manggarai Barat yang telah menggunakan layanan *SMS Gateway* dalam mengurus pensiunannya. Penjelasannya sebagai berikut:

“Mengakses informasi pensiunan dengan *SMS Gateway* itu mudah sekali, cukup kita mengirim sms dengan format tertentu dan mengirimnya ke nomor 082145554846, maka akan langsung mendapatkan balasan dari BKPPD” (Hasil wawancara dengan MM selaku PNS di Kabupaten Manggarai Barat, 24 Juni 2019, di rumahnya pukul 15:00 sore).

Komentar yang senada juga disampaikan oleh pegawai yang pernah mengakses layanan kenaikan pangkat dengan *SMS Gateway*. N salah satu pegawai di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut komentarnya:

“Saya kemarin mengakses layanan pengurusan kenaikan pangkat hanya lewat SMS, kemudian tidak lama ada balasannya” (Hasil wawancara dengan N salah satu PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 26 Juni 2019 di rumahnya pukul 16:00 sore)

Menganalisis hasil wawancara dari dua informan diatas, peneliti simpulkan bahwa untuk mengakses *SMS Gateway* ini cukup dengan mengirim sms lewat telpon seluler atau HP dengan format PENS spasi NIP untuk pengurusan informasi pensiunan dan KP spasi NIP untuk pengurusan informasi kenaikan pangkat.

c. Kemudahan penggunaan layanan

Kemudahan penggunaan layanan *SMS Gateway* sangat menentukan suksesnya penerapan aplikasi *SMS Gateway*. Hal ini dikarenakan tujuan awal dari diterapkannya SMS Gateway di Kabupaten Manggarai Barat untuk memudahkan pegawai dalam mengakses informasi kepegawaian di Kabupaten Manggarai Barat.

Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wilayahnya meliputi daratan pulau Flores bagian barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya dengan luas wilayah 9.450 km² yang terdiri dari

wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilaah lautan 7.052,97 km². Kondisi jaringan internet yang minim dan sebagian besar wilayahnya tidak tersentuh jaringan internet. Hal inilah salah satu alasan hadirnya *SMS Gateway* dengan tujuan memudahkan pegawai untuk mengakses informasi terkait kepegawaian dengan menggunakan telepon seluler.

Kemudahan dalam menggunakan *SMS Gateway* ini sangat dirasakan oleh penggunanya yaitu pegawai di lingkup Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini dapat dilihat dari komentar-komentar informan terkait kemudahan dalam menggunakan layanan *SMS Gateway*.

Berikut komentar dari NA salah satu PNS di Kabupaten Manggarai Barat. komentarnya sebagai berikut:

“Pengalaman saya, menggunakan *SMS Gateway* ini sangat memudahkan, hanya membutuhkan telepon seluler dan jaringannya, kita dapat mengirim sms dan akan mendapatkan sms balasan dari pihak BKPPD. Seperti saya kemarin ketika mengurus pensiunan” (Hasil wawancara dengan NA salah satu pensiunan PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 24 Juni 2019 di rumahnya pukul 15:00 sore)

Komentar yang senada juga disampaikan oleh informan NM salah satu PNS di Kabupaten Manggarai Barat. Komentarnya sebagai berikut:

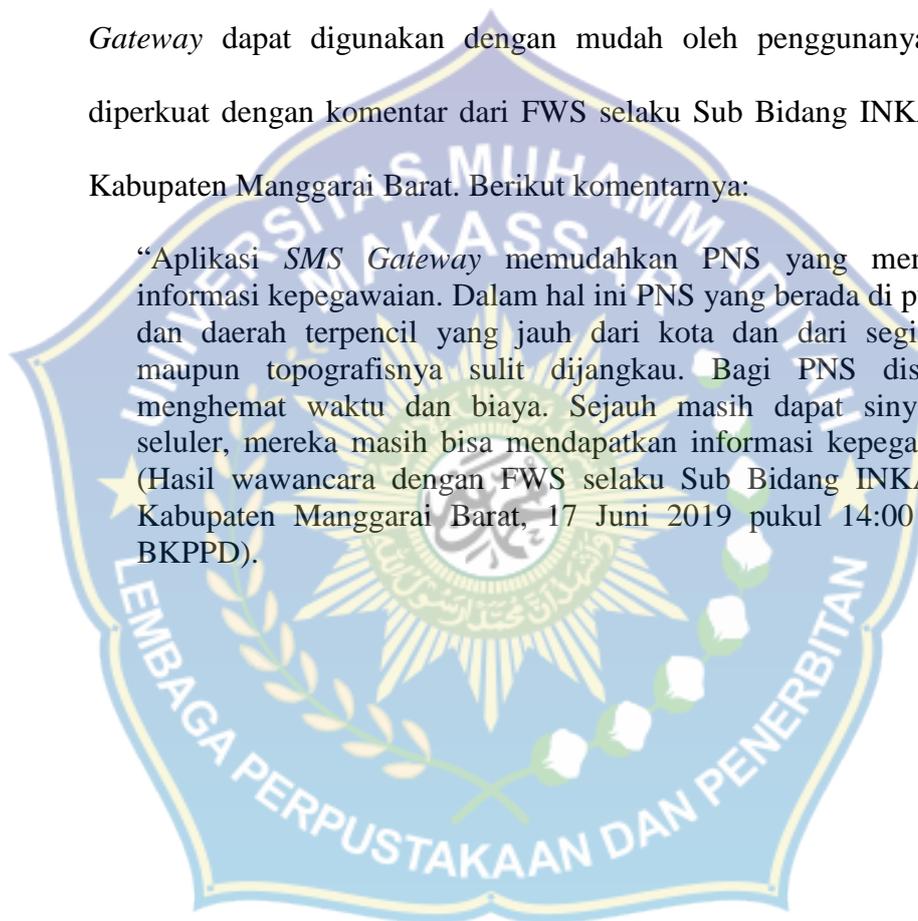
“Menggunakan *SMS Gateway* dalam mengurus dan mengakses informasi kenaikan pangkat sangat membantu dan memudahkan. Saya tidak mesti lagi bolak balik ke kantor untuk mencari tau informasi status kepegawaiaan saya, jadi hemat tenaga dan biaya” (Hasil wawancara dengan NM salah satu PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 25 Juni 2019 di rumahnya pukul 15:00 sore)

Kemudahan dalam menggunakan *SMS Gateway* ini juga diakui oleh inform lainnya, komentarnya sebagai berikut:

“Ya sekarang sudah mudah mengurus dan mencari tau status kenaikan pangkat di BKPPD, cukup dengan sms kepihak BKPPD dan akan dibalas langsung status” (Hasil wawancara dengan N salah satu PNS dilingkup Kabupaten Manggarai Barat, 26 Juni 2019 di rumahnya pukul 16:00 sore)

Menganalisis komentar dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam menggunakan layanan *SMS Gateway* dapat digunakan dengan mudah oleh penggunanya. Hal ini diperkuat dengan komentar dari FWS selaku Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat. Berikut komentarnya:

“Aplikasi *SMS Gateway* memudahkan PNS yang membutuhkan informasi kepegawaian. Dalam hal ini PNS yang berada di pulau-pulau dan daerah terpencil yang jauh dari kota dan dari segi geografis maupun topografisnya sulit dijangkau. Bagi PNS disana lebih menghemat waktu dan biaya. Sejahter masih dapat sinyal telepon seluler, mereka masih bisa mendapatkan informasi kepegawaiannya” (Hasil wawancara dengan FWS selaku Sub Bidang INKA BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, 17 Juni 2019 pukul 14:00 di kantor BKPPD).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. *E-Government* pada penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai

Barat dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Support* atau dukungan dari pimpinan pemerintah berupa disepakatinya kerangka konsep awal *SMS Gateway*, mengalokasikan SDM berupa teknisi dan infrastruktur berupa *software* aplikasi *SMS Gateway*, serta terlibat dalam sosialisasi *SMS Gateway*. Namun belum membuat regulasi tentang penerapan *e-government* secara umum di Kabupaten Manggarai Barat.
- b. *Capacity* atau keberdayaan dari BKPPD Kabupaten Manggarai Barat berupa dianggarkannya pengelolaan *SMS Gateway* dalam Rencana Anggaran Kerja (RAK) dan Dokumen Rencana Kerja (RAK) BKPPD, menyediakan infrastruktur berupa PC, aplikasi dan server, serta membentuk tim khusus mengelola aplikasi *SMS Gateway*.
- c. *Value* atau manfaat dari penerapan *SMS Gateway* di Kabupaten Manggarai Barat memiliki dua cakupan layanan yaitu layanan informasi kenaikan pangkat (KP) dan pensiunan (Pens), kedua layanan ini dinilai sangat membantu pegawai. Namun belum cukup memenuhi kebutuhan pegawai dalam memperoleh informasi dan diharapkan ke

depan untuk dikembangkan pada layana yang lainnya terkait kepegawaian. Dan layanan *SMS Gateway* ini sangat memudahkan pegawai dan dapat diakses oleh semua pegawai hanya dengan menggunakan HP dan mengirim *SMS* ke nomor dan format tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah dan Badan Kepegawaia, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pimpinan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, untuk membuat Undang-Undang berupa Perda atau Peraturan Bupati tentang penerapan *e-government* secara umum dan penerapan *SMS Gateway* secara khusus di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Kepada pihak BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, untuk mensosialisasikan *SMS Gateway* secara menyeluruh kepada semua pegawai dan mengembangkan layanan *SMS gateway* agar terwujudnya pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien di Kabupaten Manggarai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani (2015). “Penerapan E-Government di Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Kabupaten Palalawan Riau)”. Riau: Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL. 7, NO. 2.
- Elysia, Wihadanto, Sumartono (2017). *Implementasi e-Government untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi di Indonesia. Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hayati dan Purnomo, E. Priyo (2018). “Implementasi E-Governmet pada Pemerintahan Daerah Kabupaten bantul Yogyakarta”. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Indrajit, Prof. Richardus Eko. (2006). *Electronic Government, Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Aptikom.
- Indrajit, Prof. Richardus Eko. (2007). *Elektronik Government in Action, Strategi Implementasi di Berbagai Negara*. Aptikom.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Kumumur, A. Veronica (2008). “Penerapan E-Government Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di Indonesia”. Jambi: EKOTON Vol. 8, No.2.
- Mansyur, Firdaus (2017). “Penelitian E-Government di Indonesia: Studi Literasi Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI)”. Makassar: IPTEK-KOM, Vol. 19 No. 1.
- Pramono, Asep (2010). “Analisis Dan Penerapan Sms Gateway Pada “Media Jogja” Di Bandar Udara Internasional Adisucipto Yogyakarta”. Yogyakarta: Jurnal STIMIK AMIKOM.
- Suhartono, Ari (2017). “Pemanfaatan Teknologi SMS Gateway dalam Implementasi Pemodelan Pelayanan Nasabah”. Madium: Jurnal INTENSIF, Vol.1, No.1.
- Silalahi, F Diapoldo, 2017, *Analisis Implementasi SMS Gateway sebagai Auto-Respon Layanan Informasi Berbasis Store adn Reward*. Semarang: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Sony (2013). “Analisis Penerapan E-Government pada pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Tadulako: e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 7.

Sugiyono, Prof. Dr. (2017), *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Cetakan ke-25. Bandung: CV Alfabeta.

Yusuf, RM. Salahuddin dan Jumhur H. Helni (2018). “*Penerapan E-Government dalam Membangun Smart City pada Kota Bandung tahun 2018*”. Bandung: e-Proceeding of Management : Vol.5, No.3.

Website:

Admin (2019, 12 Januari). *Aplikasi Sms Gateway Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat*: <https://bkppdmabar.com/aplikasi-sms-gateway-pemerintah-kabupaten-manggarai-barat-detail-410119.html>.

Admin (2018, 13 Maret). *15 Tahun Manggarai Barat Hebat*: www.padarnews.com/2018/03/13/15-tahun-manggarai-barat-hebat/.



LAMPIRAN



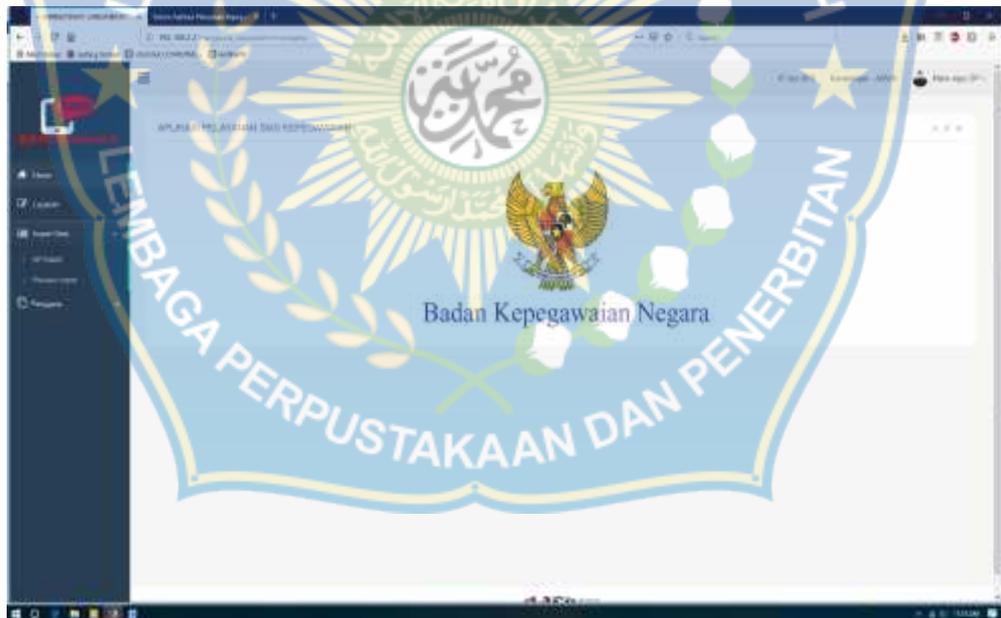
Kantor Bupati Manggarai Barat



Kantor BKPPD



Struktur Organisasi BKPPD



Aplikasi SMS Gateway



Wawancara dengan Sub Bidang Mutasi BKPPD



Wawancara dengan Sub Bidang INKA BKPPD



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Utama Wae Mata-Labuan Bajo-Flores-NTT Telp/Fax : 0385-41

SURAT KETERANGAN/ REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: Kesbang . 070/110/VI/2019

Berdasarkan surat ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1557/05/C.4-VIII/III/1440/2019, Tanggal 20 Mei 2019, Perihal : Permohonan Izin Penelitian dan setelah mempelajari rencana penelitian/ proposal yang diajukan, maka dapat diberikan **Surat Keterangan / Rekomendasi** kepada :

Nama : RISMAN
 NIM : 10564021772.15
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas/Prodi : Fisipol / Ilmu Pemerintahan
 Universitas/ PT : Muhammadiyah Makassar

Untuk melakukan kegiatan penelitian/ pengumpulan data dengan judul:

" E – GOVERNMENT PADA PENERAPAN SMS GATEWAY DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT".

Lamanya : 25 Mei s/d 25 Juli 2019
 Lokasi : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Manggarai Barat
 Penanggung Jawab : Ketua LP3M

Hal – hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti:

1. Wajib memberitahukan maksud dan tujuan kepada Instansi Pemerintah/ Swasta yang diteliti.
2. Selama melakukan penelitian tidak diijinkan melakukan penelitian dibidang lain yang mengganggu ketertiban masyarakat.
3. Harus mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Wajib melaporkan hasil penelitian beserta surat pengantar dari Instansi Tempat melakukan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat/ Rekomendasi selesai penelitian kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Barat.
5. Ijin penelitian ini akan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak peneliti melanggar ketentuan tersebut di atas.
6. Kepada para pihak yang mendapat tembusan surat ini agar memberikan bantuan untuk kelancaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan/ Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuan Bajo, 10 Juni 2019



tembusan : Dh. disampaikan kepada:

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Manggarai Barat.



**Muhammadiyah
Makassar**

Integrity · Professionalism · Entrepreneurship

Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588

Official Email: fbsp@unismuh.ac.id

Official Web: <https://fbsp.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0046/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah
MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENINGGAT : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 22 Agustus 2019 M

D e k a n,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM : 730727

tembusan :

Surat Keputusan:
 : 0046/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019
 Tanggal : 22 Agustus 2019

Susunan Tim Peneliti Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Sabtu, 24 Agustus 2019, Jam : 13.30 - Selesai Wita

NO	STAMBUK TMA : III	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUI SEMIN
1	10564 02172 15	Risman	IP	E-Governan pada Penerapan SMS Gateway di Kabupaten Manggarai Barat	Abd Kadir Adys, SH., MM Rudi Hardi, S. Sos., M.Si	1. Abd Kadir Adys, SH., MM 2. Andi Luhur Prianto, S.IP., 3. Rudi Hardi, S. Sos., M.Si 4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
2	10564 02278 15	Fifi Febrianti	IP	Smart Governance Aplikasi SIMPEL Bone App dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bone	Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si Nasrul Haq, S.Sos., M.PA	4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

Makassar, 22 Agustus
 Dekan,

Dr. H. Ihyani Malik
 NPM : 7307



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221

Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Risman
 Nomor Stambuk : 10564 02172 15
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Penelitian : E- Governman pada Penerapan SMS Gateway di Kabupaten Manggarai Barat

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Abd Kadir Adys, SH., MM (Ketua)	26-08-2019	
2	Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si	26-08-2019	
3	Rudi Hardi, S.Sos M.Si	26/08/2019	
4	Nasrul Haq, S.Sos., M.PA	26/08/2019	

Makassar, 26/08/2019 .
 Mengetahui :
 Ketua Jurusan

Dr. Nuryana Mustari, S.IP, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0046/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
DILINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah
MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENINGGAT : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

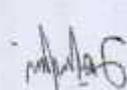
MEMPERHATIKAN : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN**
- Pertama : Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 22 Agustus 2019 M
D e k a n,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730727

tembusan :

Surat Keputusan:
: 0046/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019
: 22 Agustus 2019

**Susunan Tim Penguji Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Hari Sabtu, 24 Agustus 2019, Jam: 13.30 - Selesai Wita**

ID	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUR	KONSULTAN	PENGUJI SEMIN
1	TIM : III 10564 02172 15	Risman	IP	E- Governance pada Penerapan SMS Gateway di Kabupaten Manggarai Barat	Abd Kadir Adys, SH., MM Rudi Hardi, S. Sos., M.Si	1. Abd Kadir Adys, SH., MIV 2. Andi Luhur Prianto, S.IP.,
2	10564 02278 15	Fifi Febrianti	IP	Smart Governance Aplikasi SIMPEL Bone App dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bone	Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si Nasrul Haq, S.Sos., M.PA	3. Rudi Hardi, S. Sos., M.Si 4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

Makassar, 22 Agustus
Dekan,

Dr. H. Ihyani Malik,
NBM : 7307





FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221

Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama : Risman
 Nomor Stambuk : 10564 02172 15
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Penelitian : E- Governman pada Penerapan SMS Gateway di Kabupaten Manggarai Barat

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Abd Kadir Adys, SH., MM (Ketua)	26-08-2019	
2	Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si	26.08.2019	
3	Rudi Hardi, S.Sos M.Si	26/08/2019	
4	Nasrul Haq, S.Sos., M.PA	26/08/2019	

Makassar, 26/08/2019.

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Dr. Nuryana Mustari, S.IP, M.Si



UNIVERSITAS
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra-Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221

Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 866 988

Official Email: fosp@umh.ac.id

Official Web: http://fosp.umh.ac.id



FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI /TUTUP

Nama : RISMAN
 Stambuk : 105640217215
 Alamat : BTN. Minasauwa Blok D8 No.5
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : E-Government Pada Penerapan SMS Gateway di Kabupaten Manggarai Barat

Dosen Pembimbing : 1. Abdul Kadir Ady S, SH, MM
 2. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Lampiran dan Syarat

- Foto Copy kwitansi pembayaran skripsi dan bukti pembayaran SPP mulai semester awal sampai Akhir
- Menyeror skripsi sebanyak 4 exemplar/rangkap
- Pas foto ukuran 3x4 (satu) lembar
- Foto copy ijazah terakhir 1 (satu) lembar
- Tidak bias diwakilii untuk mendaftar ujian skripsi tutup
- Bukti ACC untuk di daftar sebagai peserta ujian skripsi/tutup

No.	Bagian	Tanda Tangan
1	Kewangan dari PD II	
2	Nilai dari Ketua Jurusan	
3	Validasi Data Simak	27/08/2019

Makassar,

Peserta Ujian

RISMAN

Kepala Bagian
Tata Usaha Fisipol

Drs. Muh Ilyas
NBM 855028

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0049/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019**

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

is Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar, setelah :
G : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

T : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

TIKAN : Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

M E M U T U S K A N

AN :
: Mengangkat dosen sebagai penguji ujian seminar tutup pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
: Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ihu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 29 Agustus 2019 M

Dekan,



H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NPM : 730727

ng bersangkutan.

Keputusan Surat Keputusan:
 Nomor : 0049/ESP/A.3-VIII/VIII/40/2019
 Tanggal : 29 Agustus 2019

Susunan Tim Penguji Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Sabtu, 31 Agustus 2019, Jam : 13.30 - Selesai Wita

STAMBUK TIM : III	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI SEMINAR
10564 02172 15	Risman	IP	E-Governance pada Penerapan SMS Gateway di Kabupaten Manggareal Barat	Abd Kadir Adys, SH., MM Rudi Hardi, S. Sos., M.Si	1. Abd Kadir Adys, SH., MM 2. Andi Luhur Prianto, S.I.P., I 3. Rudi Hardi, S. Sos., M.Si 4. Nasrul Haq, S. Sos., M.PA
10564 02278 15	Fifi Febranti	IP	Smart Governance Aplikasi SIMPEL Bone APP dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bone	Andi Luhur Prianto, S.I.P., M. Si Nasrul Haq, S.Sos., M.PA	



Makassar, 29 Agustus
 Dekan,

RIWAYAT HIDUP PENULIS



RISMAN. Dilahirkan di Papagarang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 08 November 1995, dari pasangan Ayahanda **SAKILA** dan Ibunda **ROSITA**. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2003 di SDN Pulau Papagarang dan tamat pada tahun 2009, masuk sekolah menengah pertama di MTs

Darussalam Labuan Bajo dan tamat tahun 2012, melanjutkan kembali pendidikan sekolah menengah atas di MAN Labuan Bajo dan tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai tahun 2019.

- Riwayat Organisasi yang pernah di ikuti yakni Organisasi internal Kampus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), pernah di amanahi sebagai Departemen Riset dan Pengembangan Keilmuan (RPK) Pikom IMM FISIP periode 2016/2017, kemudian pernah di amanahi sebagai Sekertaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan (RPK) Pikom IMM FISIP periode 2017/2018, dan terakhir pernah di amanahi sebagai Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan (RPK) Pikom IMM FISIP periode 2018/2019. Sedangkan organisasi eksternal kampus ialah Himpunan Mahasiswa Pesisir Manggarai Barat-Makassar (HIMAPE Mabar-Makassar), diamanahi sebagai ketua umum HIMAPE Mabar-Makassar 2019.
- Pernah mengikuti Darul Arqam Dasar (DAD) di Rumah Adat Toraja benteng somba opu tahun 2015, pernah mengikuti Darul Arqam Madya (DAM) di

SMP Atira Makassar tahun 2016, dan pernah mengikuti Latihan Intsruktur Dasar (LID) di SMP Atira Makassar tahun 2018.

- Pernah mengikuti Sekola Paradigma oleh Pimpinan Cabang IMM Kota Makassar 2016/2017, dan pernah mengikuti Sekolah Kebangsaan (SKB) Pikom IMM Fisip 2015/2016.

